KEBIJAKAN PENGHENTIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR OLEH PEMERINTAH NIGERIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KRISIS EKONOMI TAHUN 2023

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

MUHAMMAD CAESAR SAPUTRA

21323084

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

KEBIJAKAN PENGHENTIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR OLEH

PEMERINTAH NIGERIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN

KRISIS EKONOMI TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

MUHAMMAD CAESAR SAPUTRA

21323084

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENGHENTIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR OLEH PEMERINTAH NIGERIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KRISIS EKONOMI TAHUN 2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22 November 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.	
2	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	
3	Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 22 November 2024



_____

MUHAMMAD CAESAR SAPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR DIAGRAM ix
ABSTRAK x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Kerangka Pemikiran 10
1.7 Argumen Sementara 14
1.8.1 Jenis Penelitian 15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 15
1.8.4 Proses Penelitian 16
1.9 Sistematika Pembahasan 16
BAB 2 LINGKUP PERMASALAHAN KRISIS EKONOMI NIGERIA 18
2.1 Tantangan dan hambatan dari kebijakan subsidi bahan bakar. 18
2.2 Dampak dari kebijakan penghentian subsidi bahan bakar bagi masyarakat dan pemerintah 22
BAB 3 PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH NIGERIA DALAM MENGHENTIKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR TAHUN 2023 35
3.1 Analisis Teori 37
3.2 Analisis Kerangka Studi Kasus 42
3.2.1 Faktor Internal dalam Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Nigeria 42
3.2.2 Faktor Struktur Sosial dan Perilaku Masyarakat Nigeria 49
3.2.3 Faktor Proses Pembuatan Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Nigeria 55

3.2.4 Faktor Tindakan Pemerintah Nigeria dalam Krisis Ekonomi 61
3.2.5 Faktor eksternal dalam pengambilan kebijakan krisis ekonomi Nigeria 66
BAB 4 PENUTUP 73
4.1 Kesimpulan 73
4.2 Rekomendasi 76
DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aplikasi Teori..... 37
Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Nigeria 64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pendapatan dan Pengeluaran Subsidi Nigeria Tahun 2017-2023..... 19
Grafik 2. Tingkat Inflasi Nigeria (Mei-Juli 2023) 24
Grafik 3. Pendapatan Pemerintah Nigeria (NGN Miliar) 28
Grafik 4. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB Nigeria..... 29
Grafik 5. Jumlah Pengeluaran Subsidi Bahan Bakar dalam APBN Nigeria..... 30
Grafik 6. Kerusakan Karbondioksida di Nigeria dari Tahun 1998-2021..... 33
Grafik 7. Kontribusi sektor minyak dan gas alam terhadap PDB di Nigeria dari kuartal pertama 2019 hingga kuartal ketiga 2023..... 43
Grafik 8. Produksi Minyak Nigeria dari 2019 hingga 2023 (MBPD) 44
Grafik 9. Defisit Anggaran Pemerintah Nigeria (USD Juta) 46
Grafik 10. Tingkat Ketimpangan Ekonomi Penduduk Nigeria (Gini Coefficient) 51
Grafik 11. Tingkat Inflasi Nigeria dari Tahun 2019 - 2023..... 56
Grafik 12. Tren Harga Minyak Global dari Tahun 2019 - 2023..... 67

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. The Decision Making Model 12
Diagram 2. Analisis The Decision Making Model 37

ABSTRAK

Pada tahun 2023, Pemerintah Nigeria menghadapi tantangan krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor industri bahan bakar. Dalam merespons situasi ini, Presiden Bola Tinubu dan Pemerintah Nigeria mengeluarkan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar sebagai upaya menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi politik di Nigeria. Faktor terpenting dalam proses pembuatan kebijakan ini adalah faktor internal Nigeria dan faktor eksternal Nigeria, Faktor internal harus mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi domestik yang mendesak adanya reformasi, sementara faktor eksternal menyoroti dinamika global yang mempengaruhi kebijakan energi dan ketergantungan terhadap minyak dan gas. Penulis berupaya untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar dalam upaya penyelesaian krisis ekonomi yang ditinjau melalui Teori Proses Pembuatan Kebijakan (*The Decision Making Process*) oleh Richard C. Snyder. Dalam teori ini proses pengambilan keputusan harus dapat mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga melalui pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan krisis ekonomi serta menjaga kesejahteraaan masyarakat Nigeria.

Kata Kunci: Nigeria, Pemerintah Nigeria, kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, krisis ekonomi, teori proses pembuatan kebijakan

ABSTRACT

In 2023, the Nigerian government, led by President Bola Tinubu, faced a significant economic crisis impacting various sectors, including the fuel industry. In response, the administration introduced a fuel subsidy removal policy as a strategic effort to alleviate economic pressures and maintain political and economic stability in Nigeria. The most critical factors in formulating this policy were Nigeria's internal and external conditions. Internal factors necessitated urgent reforms within the domestic political and economic landscape, while external factors reflected global dynamics influencing energy policies and Nigeria's dependency on oil and gas. This paper aims to analyze the fuel subsidy removal decision-making process as a response to Nigeria's economic crisis through Richard C. Snyder's Decision-Making Process Theory. According to this theory, effective decision-making should incorporate multiple factors, ensuring that policies are targeted and responsive to the economic crisis while also safeguarding the welfare of Nigerian citizens.

Keywords: Nigeria, Nigerian government, fuel subsidy removal policy, economic crisis, decision making process theory

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subsidi bahan bakar merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintah kepada konsumen pengguna bahan bakar yang tujuannya untuk dapat mengurangi biaya atau terjangkau dari penggunaan bahan bakar bagi masyarakat tertentu. Beberapa negara telah berupaya untuk mengurangi subsidi bahan bakar maupun menghapus subsidi bahan bakar tersebut, sebagai bentuk dari upaya untuk mengurangi dan mempromosikan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan (Onyeizugbe dan Onwuka, 2012, hal 455).

Minyak ditemukan pertama kali di Oilibiri dengan jumlah yang sangat banyak pada tahun 1956, penelitian ini kemudian berlanjut dari tahun 1960 sampai dengan 1970-an hingga ke daerah Afam, Bomu, Ebubu, hingga Ughello. Kegiatan industri minyak ini pertama kali didatangkan sebuah perusahaan multinasional yaitu Shell Petroleum Development Company (SPDC). SPDC masuk ke Nigeria untuk melakukan kegiatan industri minyak, mengundang perusahaan multinasional lainnya untuk juga ikut melakukan kegiatan industri minyak di Nigeria, seperti Chevron, Mobil, Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), dan lainnya. Nigeria menjadi salah satu negara eksportir minyak terbesar di Afrika serta Nigeria juga berada di peringkat 10 sebagai negara terbesar di dunia dalam kegiatan ekspor minyak (Chairawaty, 2009, hal 40-75).

Subsidi bahan bakar di Nigeria pertama kali dibuat pada tahun 1970an yang merupakan bentuk respons dari pemerintah Nigeria untuk mengatasi lonjakan harga

minyak di tahun 1973. Bersamaan dengan kebijakan subsidi ini, Pemerintah Nigeria juga mengeluarkan undang-undang *Petroleum Decree* No.51 yang di mana undang-undang ini dibuat untuk memperkuat kepemilikan industri minyak oleh Pemerintah Nigeria. Sehingga dengan adanya undang-undang ini peran Pemerintah Nigeria lebih kuat dalam menjamin dan meningkatkan keterlibatan negara diseluruh kegiatan industri minyak, seperti pendistribusian, penetapan harga minyak, dan subsidi bahan bakar oleh pemerintah Nigeria.

Temuan minyak di Nigeria ini sangat berpengaruh besar kepada pendapatan negara, dari segi pengolahan dan pendistribusian, semua dibawah naungan negara. Pemerintah Nigeria terus mendapatkan pemasukan dari daerah-daerah di Nigeria yang beroperasi pada sektor industri minyak, sehingga Nigeria tidak lagi menghasilkan pendapatan dari sektor lainnya namun sektor minyak yang menjadi sumber pendapatan bagi negara Nigeria (Genova dan Falola, 2003, hal 137-144).

Pemerintah Nigeria mengabaikan kebutuhan adanya diversifikasi ekonomi di sektor lainnya karena terlalu menganggap bahwa sektor industri minyak merupakan sumber pendapatan utama dari negara Nigeria. Setelah beberapa dekade ditemukannya minyak di Nigeria, pemerintah langsung mengambil langkah untuk pelan-pelan mulai menggantikan sektor pertanian yang merupakan awal dari sumber pendapatan utama Nigeria.

Pada awal 1980 Pemerintah Nigeria mulai mengalami kesulitan dan kerugian yang disebabkan oleh kurangnya pemerintah untuk melakukan diversifikasi ekonomi di sumber daya alam lainnya. Kemudian pemerintah mengambil langkah untuk membuat kebijakan mengatasi ketidakstabilan ekonomi

dengan cara mengeluarkan kebijakan subsidi bahan bakar (Chairawaty, 2009, hal 40-75).

Subsidi bahan bakar ini namun tidak berjalan sepenuhnya baik hingga 1986, subsidi bahan bakar di Nigeria dihapus oleh Pemerintah Nigeria. Kemudian subsidi ini kembali dibentuk oleh pemerintah untuk dapat membantu masyarakat Nigeria menjangkau bahan bakar. Pada tahun 2012, Pemerintah Nigeria secara mendadak kembali mencetuskan kebijakan untuk menghapus kembali subsidi bahan bakar. Sehingga pencetusan dari kebijakan ini membuat masyarakat Nigeria tidak terima serta berdampak besar kepada mata uang Naira dan sektor perekonomian di Nigeria.

Pada tahun yang sama, akhirnya pemerintah kembali menerapkan subsidi bahan bakar, karena tidak ditemukannya jalan keluar antara pemerintah dan masyarakat. Sejak itu Pemerintah Nigeria mengeluarkan banyak biaya untuk membayar subsidi bahan bakar sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Nigeria. Pada tahun 2022, Pemerintah Nigeria tidak mampu mempertahankan kebijakan subsidi bahan bakar ini hingga anggaran subsidi bahan bakar naik 23 persen dibanding anggaran pendapatan nasional Nigeria. Kemudian pada bulan Juni 2023, Pemerintah Nigeria mencetuskan kembali kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Nigeria (Ozili dan Obiora, 2023, hal 115-130).

Beban fiskal terhadap subsidi bahan bakar ini merupakan beban anggaran terbesar bagi Pemerintah Nigeria. Dengan adanya kebijakan penghentian subsidi bahan bakar di Nigeria, pemerintah dapat menyelesaikan berbagai masalah seperti

defisit anggaran dan krisis ekonomi, sehingga dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Nigeria dapat melakukan diversifikasi ekonomi dengan anggaran yang tersedia untuk sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Nigeria. Subsidi bahan bakar ini juga dapat mendorong adanya penyelundupan bahan bakar ke negara lain dan rawan disalahgunakan atau korupsi. Sehingga dengan adanya kebijakan penghentian bahan bakar ini dapat membuat bahan bakar bisa mencapai target yang dituju oleh Pemerintah Nigeria (Adagunodo, 2022, hal 137-152).

Kemudian permasalahan ini tidak hanya menjadi permasalahan domestik, ketidakstabilan harga minyak global menyebabkan Nigeria yang harus dapat beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar minyak global. Sebab Pemerintah Nigeria masih memilih untuk melakukan kegiatan ekspor minyak mentah dan mengimpor minyak olahan untuk menjaga kebutuhan masyarakat di Nigeria. Dalam beberapa tahun terakhir peran internasional (eksternal) juga sangat berdampak pada kegiatan sektor minyak di Nigeria misalnya adanya tren global yang menunjukkan untuk peralihan ke energi terbarukan, terutama pada negara-negara penghasil minyak ditekankan untuk melakukan perubahan guna menghindari dari adanya ketergantungan terhadap minyak. Kebijakan inilah yang menunjukkan bahwa Nigeria tidak hanya berhadapan dengan masalah subsidi sebagai isu domestik, namun juga sebagai bagian dari adanya tekanan global (Adebayo, 2023).

Pemerintah Nigeria sebagai *decision makers*, telah merumuskan pelaksanaan terhadap urgensi krisis ekonomi di tahun 2023 yang tujuannya untuk

memfasilitasi seluruh kepentingan masyarakat di Nigeria dan menjaga sistem ekonomi politik di Nigeria agar dapat berjalan dengan baik. Keputusan penghentian subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria, merupakan proses pengambilan keputusan terhadap krisis ekonomi tahun 2023. Proses pengambilan keputusan ini telah melibatkan beberapa faktor, termasuk faktor internal, struktur sosial dan perilaku masyarakat, proses pembuatan kebijakan, tindakan, dan eksternal (Snyder, 2002, hal 85).

Berdasarkan pada uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria dalam mengatasi tantangan krisis ekonomi tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Apa faktor-faktor utama yang mendorong pemerintah Nigeria untuk menghapus subsidi bahan bakar pada tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi seberapa efektif kebijakan penghentian subsidi bahan bakar yang dibuat Pemerintah Nigeria untuk menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi tahun 2023.
2. Mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi Pemerintah Nigeria dalam menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi di Nigeria.
3. Menjelaskan penyebab dan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi yang melanda Nigeria.

4. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi kelompok rentan dari berlakunya penghentian subsidi bahan bakar yang dibuat oleh Pemerintah Nigeria. Kelompok rentan ini merupakan masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata, contohnya seperti petani-petani kecil yang merupakan konsumen dari subsidi bahan bakar di Nigeria.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan dalam penelitian meliputi pembahasan mengenai dampak dan faktor-faktor yang membuat kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria perlu dihapuskan dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi tahun 2023 dan bagaimana peran serta upaya Pemerintah Nigeria sebagai *decision makers*, dapat mengatasi permasalahan krisis ekonomi tersebut dengan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar. Penulis membatasi ruang cakupan penelitan ini pada tahun 2023.

Pada tahun tersebut Nigeria secara resmi mencatat dalam sejarah terbesar mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti anggaran subsidi bahan bakar yang banyak dihabiskan oleh Pemerintah Nigeria, subsidi bahan bakar ini tujuannya adalah untuk membantu kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Nigeria.

Subsidi bahan bakar ini dapat membuat harga bahan bakar tetap rendah dan dapat dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat di Nigeria. Kemudian dengan adanya subsidi bahan bakar ini Pemerintah Nigeria dapat mencegah adanya lonjakan harga bahan bakar yang dapat menimbulkan inflasi dan kegaduhan pada kehidupan sosial.

Sehingga dengan adanya subsidi bahan bakar ini dapat menjaga kegiatan industri minyak mentah di dalam negeri dan mampu menjaga kegiatan produk impor lainnya. Pada bulan Juni 2023, Pemerintah Nigeria secara resmi mengumumkan penghentian subsidi bahan bakar, yang tujuannya adalah untuk mengatasi krisis ekonomi dan mengurangi beban anggaran pendapatan Nigeria.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jun Rentschler menjelaskan bahwa subsidi dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di suatu negara, subsidi juga bisa membantu mendorong pembangunan ekonomi dengan cara mendukung industri yang menggunakan energi. Sehingga dengan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, dapat membantu negara dalam meredistribusikan kekayaan nasional. Namun kenyataannya bahwa adanya subsidi bahan bakar ini membuat pemerintah menjadi kesulitan, subsidi bahan bakar justru merugikan seluruh sektor seperti ekonomi, sosial, lingkungan hingga pembangunan berkelanjutan. Subsidi bahan bakar di negara berkembang merupakan alat untuk mendorong kegiatan industri minyak. Contohnya adalah Brasil, Pemerintah Brasil membuat kebijakan subsidi bahan bakar untuk memfasilitasi kegiatan industri minyak dan mempertahankan harga bahan bakar yang dapat dijangkau oleh masyarakat Brasil. Tujuan dari subsidi bahan bakar ini sebenarnya baik, namun kebijakan subsidi bahan bakar ini dapat membuat ketergantungan pada penggunaan bahan bakar, memperburuk keseimbangan fiskal, menghambat pembangunan berkelanjutan (Rentschler, 2018, hal 95-105).

Julian Muhammad Hasan menjelaskan bahwa setiap dari semua rencana yang dibuat Pemerintah Indonesia dalam mengurangi subsidi harga BBM, pasti

akan memunculkan dukungan dan penolakan dari masyarakat hingga pemerintah. Karena sebagian masyarakat berpendapat dengan adanya subsidi bahan bakar minyak ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk tetap dapat menjangkau BBM, namun sebagian masyarakat juga menganggap bahwasannya dengan adanya pengurangan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan dana yang digunakan ke subsidi BBM ke sektor lainnya. Sehingga dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan menaikkan harga BBM juga dapat meningkatkan taraf hidup seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Namun penulis juga menekankan bahwa Pemerintah Indonesia juga harus mempersiapkan banyak hal terkait dalam mengurangi subsidi bahan bakar dan menaikkan harga BBM contohnya seperti menyusun rencana untuk kedepannya dalam mengakhiri subsidi bahan bakar minyak. Dalam penemuan pada artikel jurnal ini, penulis menemukan beberapa alasan mengapa Pemerintah Indonesia harus mengakhiri subsidi bahan bakar minyak seperti Indonesia adalah negara yang sangat boros dan tidak mempunyai aturan yang kuat dalam pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak. Sehingga dengan kurangnya aturan dalam subsidi bahan bakar minyak ini sering sekali ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak di Indonesia (Hasan, 2018, hal 300-309).

Adilson de Olivera dan Tara Laan menjelaskan bahwa tujuan utama dari Pemerintah Brazil dalam menciptakan kebijakan subsidi energi adalah untuk mendorong kegiatan industri energi di Brazil. Pada tahun 1980-an kebijakan subsidi energi ini dianggap sebagai alat yang dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan berkelanjutan di Brazil. Tapi secara jangka pendek, sebenarnya

kebijakan subsidi bahan bakar ini cukup relevan dan baik untuk meberikan stimulus ekonomi dan dapat membantu Pemerintah Brazil dalam meredistribusi pendapatan. Namun dalam beberapa permasalahan kebijakan subsidi energi ini dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan mempersulit untuk Pemerintah Brazil dalam melakukan reformasi. Karena kebijakan subsidi energi ini cenderung mengakar dan sulit untuk menciptakan kekuatan pada kelompok pemangku kepentingan dalam menyusun reformasi terhadap kebijakan subsidi energi. Penulis memberikan satu contoh studi kasus yang relevan dalam masalah ini. Indonesia yang dulunya mampu dalam pelaksanaan kebijakan subsidi bahan bakar minyak karena pada saat itu Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak, namun ketika Indonesia tidak lagi mampu menjadi pengekspor bahan bakar minyak dan beralih menjadi pengimpor, Indonesia langsung dihadapi dengan konsekuensinya yaitu defisit fiskal yang parah dan keresahan masyarakat terhadap Pemerintah Indonesia yang terpaksa menaikkan harga BBM karena Pemerintah Indonesia yang tidak mampu membayar biaya program subsidi (Oliveira dan Laan, 2010, hal 12-14).

Taufiqurokhman menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil merupakan salah satu wujud dari pemerintah dalam mengambil langkah, yang tujuannya adalah untuk menyusun rencana yang dapat memperhatikan segala kebutuhan masyarakatnya, agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakatnya, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus seimbang dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat, agar pemerintah dapat

membuat kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakatnya (Taufiqurakhman, 2014, hal 3).

Pada penelitian terdahulu, sudah menjelaskan dari berbagai sudut pandang pembuat kebijakan subsidi hingga dampak dari kebijakan subsidi yang telah dibuat. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat melengkapi dari beberapa literatur yang telah ada. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria untuk mengatasi tantangan krisis ekonomi tahun 2023 dengan menggunakan sudut pandang dari teori pembuatan kebijakan (*decision making*).

Konsep teori pembuatan kebijakan ini berfokus pada kebutuhan masyarakat yang harus dilengkapi oleh pemangku kepentingan di suatu negara. Dengan adanya sudut pandang dari teori decision making, peran negara diharapkan mampu untuk dapat menyusun rencana atau alternatif dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi di Nigeria.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *decision making* atau teori pembuatan kebijakan ini adalah sebuah teori yang dibuat untuk merumuskan pelaksanaan terhadap suatu urgensi yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat yang ada pada suatu negara maupun wilayah. Perumusan pelaksanaan tersebut dibuat oleh *decision makers*, sehingga dengan adanya *decision makers* di dalam penyusunan pelaksanaan ini dapat secara langsung memfasilitasi kepentingan masyarakatnya.

Menurut Richard Snyder di dalam bukunya yang berjudul Foreign Policy Decision-Making, Snyder menjelaskan makna dari decision making yaitu sebuah tindakan yang tujuannya adalah untuk memahami kegiatan pemerintahan di suatu

negara dalam hubungan internasional (Snyder, 2002, hal 85). Pembuatan kebijakan dan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu negara memiliki kaitan yang sangat erat dalam menyikapi berbagai permasalahan di suatu negara. Kemudian pemerintah juga harus dapat menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di suatu negara.

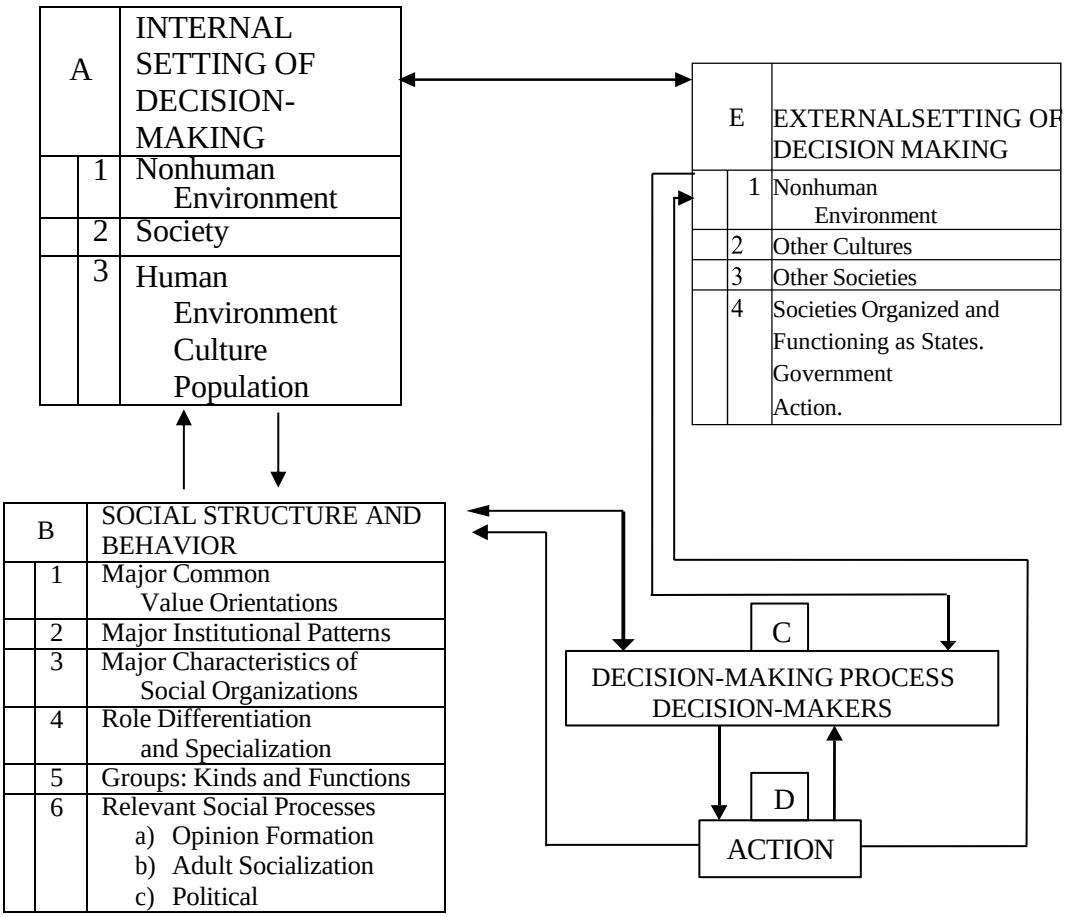
Aktor hubungan internasional dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan dengan permasalahan dan kejadian apa yang sedang terjadi. Keadaan tersebut yang biasanya dapat membantu aktor dalam menyusun rencana untuk membuat kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan internasional. Latar belakang yang menjadi tujuan untuk mencapai keputusan dalam pengambilan keputusan adalah untuk menentukan sikap dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.

Ketegangan antara Ukraina dan Rusia merupakan salah satu contoh yang telah mempengaruhi kebijakan serta sikap negara-negara lain di dunia. Eropa melalui uni eropa telah membuat kebijakan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman di wilayah Eropa terhadap Rusia, seperti peningkatan kerjasama keamanan dalam bidang intelijen, pengawasan perbatasan, dan memberikan dukungan serta bantuan militer kepada Ukraina.

Meskipun Ukraina bukan menjadi bagian dari keanggotaan Uni Eropa, tetapi hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa terus terjaga dengan baik. Sehingga upaya dari Uni Eropa untuk Ukraina terus mendukung Ukraina untuk mencapai reformasi dan meningkatkan integrasi antara Ukraina dan Uni Eropa. Dari contoh di atas, pendapat yang dikemukakan oleh Snyder sangat selaras terhadap pengambilan kebijakan. Setidaknya ada dua aspek utama yang harus diperhatikan

oleh *decision makers* yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari negara-negara yang ada di eropa (Snyder, 2002, hal 86).

Diagram 1. The Decision Making Model



Sumber: (Snyder, 2002, hal 64)

Richard C. Snyder mengelompokkan faktor-faktor utama yang menjadi syarat dalam pengambilan dan perumusan kebijakan sebagai berikut:

a. **Faktor Internal**, faktor ini menurut Snyder merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya sebuah situasi di mana pemerintah di suatu negara terlibat dalam pembuatan kebijakan. Namun tidak hanya pemerintah yang ikut terlibat di dalam penyusunan kebijakan ini, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut juga harus turut ikut serta dalam penyusunan kebijakan. Sehingga

dengan peran aktor yang dilibatkan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan berbagai polemik permasalahan yang ada di suatu negara (Snyder, 2002, hal 65-66).

b. **Faktor struktur sosial dan perilaku masyarakat**, faktor ini yang sesuai dikemukakan oleh Snyder merupakan faktor yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan, dengan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat suatu negara. Kondisi masyarakat pada suatu negara akan selaras dengan proses dalam pembuatan kebijakan di suatu negara, sehingga dengan adanya faktor struktur sosial dan perilaku masyarakat akan mempengaruhi faktor internal dalam proses pembuatan kebijakan (Snyder, 2002, hal 65-66).

c. **Faktor proses pembuatan kebijakan**, faktor ini menurut Snyder merupakan salah satu jembatan antara faktor internal dan faktor eksternal. Karena dalam proses pembuatan kebijakan, setiap aktor yang berperan di dalam pembuatan kebijakan mempunyai peran yang penting untuk selalu diutamakan (Snyder, 2002 hal 65-66). Kemudian kebijakan yang telah dibuat oleh aktor hubungan internasional ini dapat menjadi alat untuk menyelesaikan berbagai polemik permasalahan di berbagai sektor.

d. **Faktor tindakan**, pada faktor tindakan ini, peran dari seluruh aktor hubungan internasional yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan harus sesuai dengan tindakan yang diambilnya. Snyder melalui bukunya menjelaskan faktor tindakan ini merupakan faktor yang berasal dari aspek dan faktor yang diperhatikan oleh seluruh aktor hubungan internasional di dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga dalam mengambil tindakan perlu adanya

perhatian kepada internal dan eksternal oleh *decision making* untuk mencapai tujuan bersama (Snyder, 2002, hal 65-66).

e. **Faktor eksternal**, Snyder melalui bukunya menjelaskan bahwa faktor eksternal merupakan dampak dari kebijakan yang dibuat suatu negara dan berpengaruh kepada luar wilayah suatu negara. Dengan demikian perlu adanya peran dari negara lain dalam dunia internasional. Contohnya seperti dalam proses pembuatan kebijakan, negara perlu adanya peran dari negara lain maupun organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga dengan adanya peran dari dunia internasional di dalam pembuatan kebijakan dapat membantu menghadapi tantangan-tantangan tersebut (Snyder, 2002, hal 65-66).

1.7 Argumen Sementara

Pada tahun 2023, Nigeria sedang dihadapkan dengan masalah yang serius akibat dari adanya krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor industri bahan bakar di Nigeria. Dengan adanya kondisi Nigeria yang sedang mengalami krisis ekonomi, Pemerintah Nigeria sebagai *decision makers*, perlu membuat keputusan yang strategis untuk dapat mengatasi tantangan krisis ekonomi di Nigeria. Untuk mengatasi tantangan krisisi ekonomi, Nigeria perlu mengelola kebijakan bahan bakar dengan baik, karena kebijakan bahan bakar ini merupakan salah satu faktor dari dinamika ekonomi di Nigeria.

Pemerintah Nigeria perlu bertindak untuk menegakkan kebijakan yang mempunyai hubungan dengan adanya krisis ekonomi di Nigeria seperti kebijakan penghentian subsidi bahan bakar. Dalam perumusan kebijakan, Pemerintah Nigeria perlu mengaitkan dengan beberapa faktor yang ada pada teori *decision making* oleh Richard C. Snyder. Faktor tersebut seperti faktor internal, faktor struktur sosial dan

perilaku masyarakat, faktor proses pembuatan kebijakan, faktor tindakan dan faktor eksternal. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nigeria, serta dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Nigeria diharapkan dapat memberikan solusi, alternatif yang dapat dipertimbangkan, serta mengatasi tantangan krisis ekonomi tahun 2023.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan sebuah metode yang dikenal dengan istilah penelitian yang tidak memerlukan penggunaan data berupa angka maupun variabel. Penelitian kualitatif berasal dari ilmu sosial serta fenome maupun perilaku, sehingga dapat melibatkan studi dengan menggunakan studi kasus, sejarah, observasi, dan interaksional (Hasibuan, 2022, hal 39).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penulis menggunakan negara (pemerintah) dalam subjek penelitian ini, yang dalam hal ini adalah Nigeria. Objek penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Nigeria. Kemudian dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai kebijakan penghentian subsidi bahan bakar Pemerintah Nigeria dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi pada tahun 2023.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh data dari pihak lain

maupun data yang berdasarkan dari beberapa arsip (Pertiwi, 2017, hal 212). Pada penelitian ini data yang ditemukan penulis berasal dari berbagai sumber seperti buku, website pemerintahan, dan jurnal-jurnal. Data-data tersebut kemudian penulis kumpulkan dan diolah agar penulis dapat memahami dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini terlebih dahulu dilakukan dengan penulis melakukan riset untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber ini terbagi menjadi dua yaitu sumber buku dan jurnal serta sumber internet. Setelah sumber terkumpul, kemudian penulis menemukan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Topik ini dibentuk dengan adanya penulis mengumpulkan berbagai sumber referensi dan literatur seperti buku, jurnal, dan internet. Dengan demikian penulis mampu untuk menjelaskan masalah melalui fakta yang jelas berdasarkan riset dari penulis pada penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I: Berisi latar belakang dari penelitian ini; secara umum menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi Nigeria terhadap kebijakan penghentian subsidi bahan bakar. Rumusan masalah; tujuan penelitian; cakupan penelitian; tinjauan pustaka; kerangka pemikiran; argumen sementara; metode penelitian; sistematika pembahasan.

Bab II: Menjelaskan lingkup permasalahan krisis ekonomi di Nigeria; menjelaskan tantangan serta hambatan dari kebijakan subsidi bahan bakar; menjelaskan dampak dari kebijakan penghentian subsidi bahan bakar bagi

masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi tahun 2023.

Bab III: Menganalisis konteks studi kasus kebijakan Pemerintah Nigeria dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi 2023; faktor internal pengambilan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi di Nigeria; struktur sosial dan perilaku masyarakat Nigeria; proses pengambilan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar; faktor eksternal pengambilan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi di Nigeria.

Bab IV: Membahas kesimpulan yang diambil dari hasil analisis penelitian yang berdasarkan dengan konsep yang sesuai. Di akhir penelitian, jika ada dan diperlukan bisa memberikan rekomendasi dan saran.

BAB 2

LINGKUP PERMASALAHAN KRISIS EKONOMI NIGERIA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan lingkup permasalahan krisis ekonomi yang terjadi di Nigeria pada tahun 2023 hingga tantangan dan dampak dari kebijakan penghentian subsidi bahan bakar bagi pemerintah dan masyarakat yang menyebabkan krisis ekonomi terjadi di Nigeria. Penulis membagi pembahasan menjadi tiga subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang tantangan serta hambatan dari kebijakan subsidi bahan bakar. Subbab kedua menjelaskan tentang dampak dari kebijakan penghentian subsidi bahan bakar bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi tahun 2023.

2.1 Tantangan dan hambatan dari kebijakan subsidi bahan bakar.

Produk minyak bumi merupakan tolak ukur segala sektor yang ada di Nigeria, sektor sosial dan ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan Nigeria. Sumber daya minyak merupakan kekuatan ekonomi negara ini karena sebagian besar pendapatan negara Nigeria berasal dari minyak dan kekayaan gas. Kekuatan ini tidak tanggung-tanggung dalam kontribusinya pada pendapatan pemerintah, sekitar 99% minyak dan gas menyumbang kontribusinya pada pendapatan pemerintah dan 38.8% pada PDB (Obasi, et al. 2017, hal 51-70).

Nigeria melalui sumber daya minyak dan gas dapat menghasilkan pendapatan hingga miliaran dolar selama puluhan tahun terakhir sejak minyak ditemukan di Nigeria. Tetapi, Pemerintah Nigeria masih belum dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Nigeria untuk hidup yang lebih sejahtera. Hal tersebut terjadi

karena Pemerintah Nigeria mengalami banyak tantangan dan hambatan dari kebijakan subsidi bahan bakar. Isu minyak dan gas ini selalu dikaitkan dengan Pemerintah Nigeria yang tidak mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatannya, seperti adanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan monopoli nasional, penyelundupan minyak dan gas, birokrasi yang tidak berjalan dengan baik, anggaran subsidi yang berlebihan sebelumnya terhadap pasokan minyak dan gas olahan, serta pabrik produksi dalam negeri yang hampir runtuh (Ibanga 2005, hal 1).

Grafik 1. Pendapatan dan Pengeluaran Subsidi Nigeria Tahun 2017-2023

Pendapatan dan Pengeluaran Subsidi Nigeria antara tahun 2017 dan 2023 (NGN Miliar)		
Tahun	Pendapatan	Pengeluaran
2017	2670	144.5
2018	3960	722.3
2019	4540	551.2
2020	3940	102
2021	6090	1780
2022	9970	4000
2023	9720	3600

Sumber: (Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative, 2023)

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pendapatan dan pengeluaran subsidi mengalami ketidakseimbangan selama tahun 2017-2023. Ketidakseimbangan ini

terjadi karena antara tahun 2017-2023, pendapatan dam pengeluaran Nigeria dalam sektor minyak menunjukkan peningkatan yang konsisten sebagai berikut:

a. 2017-2018: Terjadi peningkatan pengeluaran subsidi yang signifikan disebabkan adanya perubahan kebijakan dan fluktuasi harga minyak global yang mempengaruhi harga dan biaya bahan bakar di Nigeria.
b. 2018-2019: Pada rentang tahun ini pengeluaran subsidi mengalami penurunan karena pemerintah Nigeria melakukan peningkatan kebijakan mengenai stabilisasi harga bahan bakar di Nigeria.
c. 2019-2020: Terjadi penurunan pengeluaran subsidi karena adanya pandemi Covid-19 yang mengurangi aktivitas ekonomi secara global maupun domestik. Sehingga Pemerintah Nigeria memfokuskan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19.
d. 2020-2021: Terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pemerintah Nigeria membuat kebijakan untuk subsidi yang substansial dan menyebabkan adanya peningkatan pengeluaran subsidi di Nigeria.
e. 2021-2022: Terjadi kembali peningkatan yang signifikan karena pada rentang tahun ini sedang terjadinya lonjakan harga minyak global, sehingga Pemerintah Nigeria perlu menambah anggaran pada kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria.
f. 2022-2023: Pada rentang tahun ini pengeluaran subsidi mengalami penurunan yang tidak terlalu drastis. Penurunan ini disebabkan adanya

upaya dari Pemerintah Nigeria dalam mengendalikan pengeluaran subsidi dan kebijakan penghapusan subsidi di Nigeria resmi di hapus.

Dari penjelasan tahun di atas, Tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Nigeria sangat beragam. Dimulai dengan adanya beban pendapatan negara yang berat di sektor subsidi, tentu membuat pengeluaran anggaran untuk sektor yang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami pelemahan. Defisit anggaran yang meningkat membuat Pemerintah Nigeria harus meningkatkan pinjaman dengan negara lain yang tujuan adalah untuk dapat terus menjalankan sektor industri bahan bakar dan subsidi bahan bakar. Ketergantungan pada subsidi bahan bakar tentu menjadi hambatan bagi anggaran Pemerintah Nigeria terhadap isu fluktuasi harga minyak global. Ketidakpastian ini tentu sangat menyulitkan Pemerintah Nigeria dalam merancang anggaran jangka panjang yang baik untuk sektor lainnya. Tantangan dan hambatan lainnya adalah adanya pengelolaan subsidi yang buruk menyebabkan distribusi yang tidak merata sehingga menurunkan keefektivitas dari kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria. Tentu dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Nigeria, memicu kembali reaksi masyarakat yang tidak terima dengan adanya kenaikan harga bahan bakar di Nigeria (Oyedeji, 2023).

Pada tahun 2023 Pemerintah Nigeria mengambil kebijakan untuk menghapus semua kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria. Langkah ini tujuannya adalah untuk dapat mengurangi beban pendapatan negara dan untuk mengatasi ketidakseimbangan anggaran yang disebabkan adanya pengeluaran subsidi yang semakin tahun semakin meningkat. Penghapusan subsidi bahan bakar ini memiliki tujuan untuk mengalihkan dana yang sebelumnya pendapatan ini digunakan untuk

subsidi bahan bakar ke berbagai sektor yang lebih produktif dan mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan di Nigeria, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Nigeria. Sehingga penghapusan subsidi bahan bakar pada tahun 2023 membuka kesempatan untuk Pemerintah Nigeria dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang disebabkan adanya kebijakan subsidi bahan bakar (Onyishi, Eme and Emeh 2012, hal 57-80).

2.2 Dampak dari kebijakan penghentian subsidi bahan bakar bagi masyarakat dan pemerintah

Presiden Nigeria Bola Tinubu dilantik pada tanggal 29 Mei 2023, pada pelantikannya Presiden Nigeria Bola Tinubu menjelaskan bahwa subsidi bahan bakar sudah tidak akan ada lagi di Nigeria. “Subsidi dihentikan dan Pemerintah Nigeria tidak akan lagi membuat kebijakan subsidi bahan bakar. Anggaran akan disalurkan kembali untuk investasi yang lebih baik pada infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja yang merata untuk meningkatkan taraf hidup jutaan orang di Nigeria.” Presiden Nigeria Bola Tinubu menjelaskannya pada saat pidato pelantikannya (Usigbe, 2023). Sejak Presiden Nigeria Bola Tinubu dilantik dan membahas subsidi bahan bakar yang akan dihentikan oleh Pemerintah Nigeria, pernyataan ini membawa berbagai dampak ke masyarakat di Nigeria, antara lain:

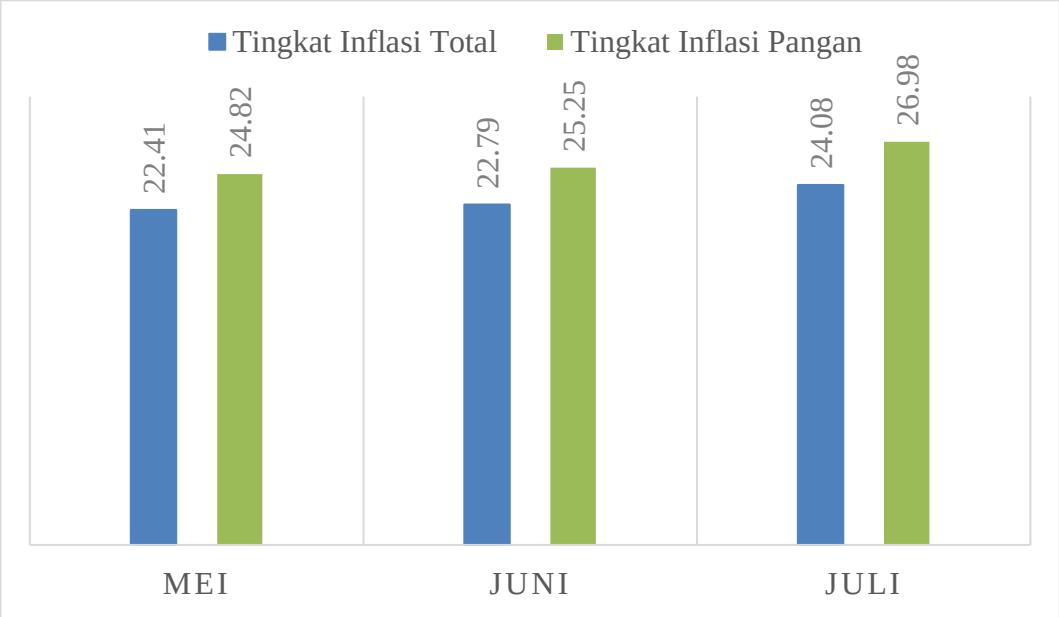
1. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar menyebabkan pengaruh terhadap harga konsumen yang meningkat. Kenaikan biaya bahan bakar hingga 150 sampai 200 persen diseluruh negeri, masyarakat yang sebelumnya dapat membeli bahan bakar dengan harga NGN 780 per gallon

(sekitar $1), kini masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih sekitar NGN 2160 per gallon ($3). Kebijakan ini tentu dapat memicu terjadinya krisis ekonomi dan membuat masyarakat di Nigeria mengalami kesulitan karena biaya hidup yang terus meningkat (Izuaka, 2024).

2. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar menyebabkan adanya penurunan terhadap daya beli masyarakat di Nigeria. Biaya hidup keseluruhan, harga barang-barang pokok menjadi meningkat. Kemudian krisis transportasi juga terjadi dikarenakan masyarakat yang semakin enggan untuk menggunakan transportasi umum. Hal ini terjadi, karena setelah adanya kebijakan penghentian subsidi bahan bakar, tarif transportasi umum juga meningkat. Sehingga banyak masyarakat di Nigeria mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan. Kebijakan ini tentu membuat masyarakat di Nigeria mengalami kesulitan dan menurunnya standar hidup serta meningkatnya angka kemiskinan di Nigeria (Izuaka, 2024).
3. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar menyebabkan kelompok masyarakat miskin yang sebelumnya bergantung pada subsidi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, kini kelompok masyarakat miskin di Nigeria harus berjuang sangat keras untuk dapat bertahan hidup. Hal ini tentu disebabkan adanya harga bahan bakar dan kebutuhan pokok yang terus meningkat, sehingga banyak kelompok masyarakat miskin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan primer, contohnya seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan (Oyedele, et al. 2023, hal 22-27).

4. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar sangat berdampak pada implikasi ekonomi di Nigeria, terutama dampak terhadap inflasi dan harga konsumen. Alasannya karena penghapusan subsidi bahan bakar dapat berhubungan dengan dinamika harga minyak, sehingga mempengaruhi perilaku harga konsumen. Namun kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria bukanlah satu-satunya dampak yang berkontribusi terhadap inflasi, masih ada faktor-faktor lain yang juga berdampak pada inflasi seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, struktur ekonomi, dan kebijakan fiskal Pemerintah Nigeria yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya krisis ekonomi di Nigeria tahun 2023. Menurut Biro Statistik Nasional (NBS), indeks harga konsumen di Nigeria melonjak menjadi 22,41 persen pada Mei 2023, hal ini menandai adanya kenaikan tingkat inflasi di Nigeria secara berturut-turut pada tahun 2023 (Evans, et al. 2023, hal 12-32).

Grafik 2. Tingkat Inflasi Nigeria (Mei-Juli 2023)



Sumber: Bank Sentral Nigeria (2023)

Menurut data di atas, Inflasi di Nigeria meningkat sebesar 0.19 poin persentase setelah adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang dibuat oleh Pemerintah Nigeria. Penghapusan subsidi bahan bakar membuat lonjakan pada harga bahan bakar di Nigeria dari rata-rata NGN 238,11 pada akhir Mei 2023 meningkat tajam hingga NGN 545,83 pada akhir Juni 2023. Kenaikan harga membuat dampak yang besar kepada masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin di Nigeria dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Nigeria tahun 2023. Sebelum adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar angka inflasi total berkisar 22,41 persen. Setelah adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, angka inflasi total kembali mmeningkat sedikit menjadi 22,79 persen pada bulan Juni. Kemudian pada bulan Juli, angka inflasi total kembali meningkat menjadi 24.08 persen. Tingkat inflasi pangan juga terkait dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria, karena usaha kecil dan menengah (UKM) di Nigeria sangat bergantung pada bahan bakar. dari bulan Mei angka inflasi pangan mencapai 24.82 persen. Kemudian meningkat di bulan Juni sebesar 25.25 persen. Hingga di bulan Juli meningkat signifikan di angka 26.98 persen. Pada akhirnya pihak yang sangat dirugikan dari adanya kebijakan yang dibuat Pemerintah Nigeria adalah konsumen, karena harga pangan yang terus meningkat dan menyebabkan adanya krisis ekonomi.

Selain dampak yang dirasakan oleh masyarakat di atas, dampak kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria ini merupakan pintu gerbang menuju perubahan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang

lebih luas di Nigeria. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini harapannya dapat membuka peluang yang lebih luas untuk pembangunan sektor-sektor non-migas. Beberapa dampak positif dari upaya Pemerintah Nigeria dalam kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria antara lain:

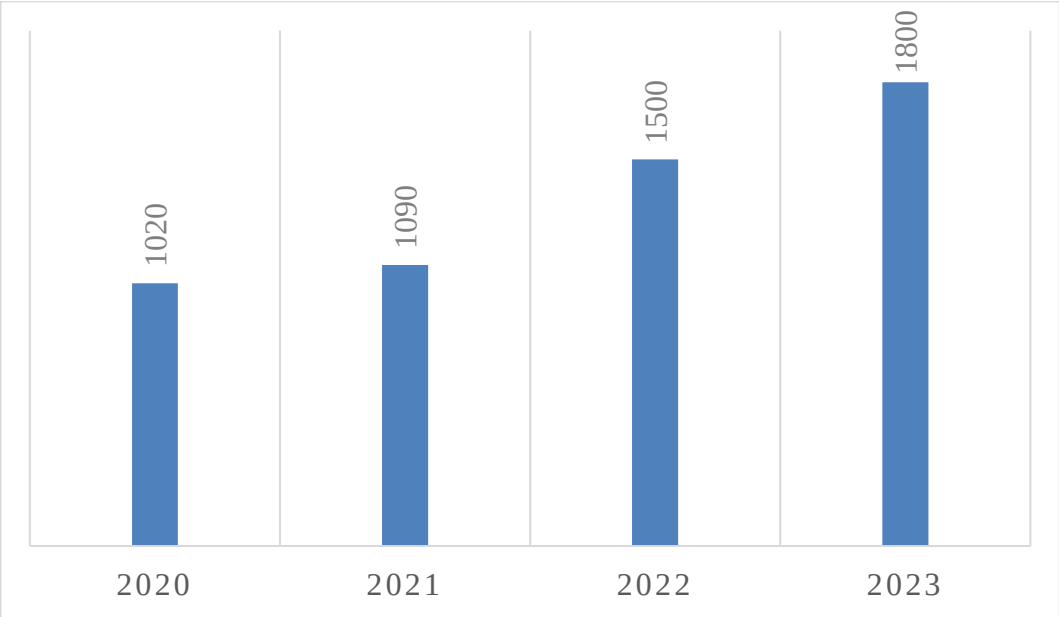
1. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang dilakukan Pemerintah Nigeria dapat meningkatkan pendapatan negara, namun pendapatan negara ini juga perlu adanya penghematan dari pengalokasian pendapatan secara efisien. Pendapatan dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar juga perlu diimbangi dengan adanya potensi dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan yang ada di Nigeria. Selain itu, Pemerintah Nigeria juga perlu mengelola dan mengalokasikan sumber daya baru sehingga kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria dapat berdampak secara menyeluruh (Akinyemi, et al. 2017, hal 268-276).

   Dampak positif dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini adalah dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar subsidi bahan bakar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik yang penting di Nigeria. Karena sebelum dihapus kebijakan subsidi bahan bakar, Nigeria sama sekali tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun pembangunan infrastruktur publik yang penting. Sehingga anggaran pendapatan negara digunakan pemerintah untuk membayar hutang yang berjumlah sangat besar. Namun, dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar tahun 2023, pemerintah juga perlu menggunakan anggaran tersebut dengan tepat dan menyalurkannya sesuai dengan tujuan untuk pengembangan infrastruktur publik dengan tanggung jawab,

transparan, dan jujur. Sehingga tujuan dari Pemerintah Nigeria melalui kebijakan ini dapat berjalan dengan baik untuk pembangunan masyarakat kritis infrastruktur (Bazilian, Morgan and Onyeji, 2012, hal 1-5).

2. Adanya penghematan dan pengalokasian dana yang baik dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, Pemerintah Nigeria selain dapat mengembangkan infrastruktur publik yang penting di Nigeria, kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini juga dapat memberikan kebebasan anggaran pendapatan Nigeria untuk pengembangan sektor lain yang membutuhkan pendanaan dari Pemerintah Nigeria. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk memfasilitasi masyarakat pada bahan bakar, sekarang anggaran ini dapat digunakan untuk subsidi ke sektor lainnya seperti pertanian, kesehatan, pariwisata, hingga pendidikan. Sebelum adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, perekonomian Nigeria mengalami pelemahan dikarenakan sektor investasi swasta yang melemah dan tingkat pengeluaran yang meningkat pada sektor-sektor yang mencakupi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya anggaran pendapatan pemerintah pada sektor-sektor ini, sehingga dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar. Pemerintah Nigeria mampu meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kebebasan pada pemerintah federal yang tugasnya adalah untuk menyalurkan anggaran tersebut pada sektor-sektor lainnya yang membutuhkan pendanaan Pemerintah Nigeria (Ogunode, et al. 2023, hal 1-9).

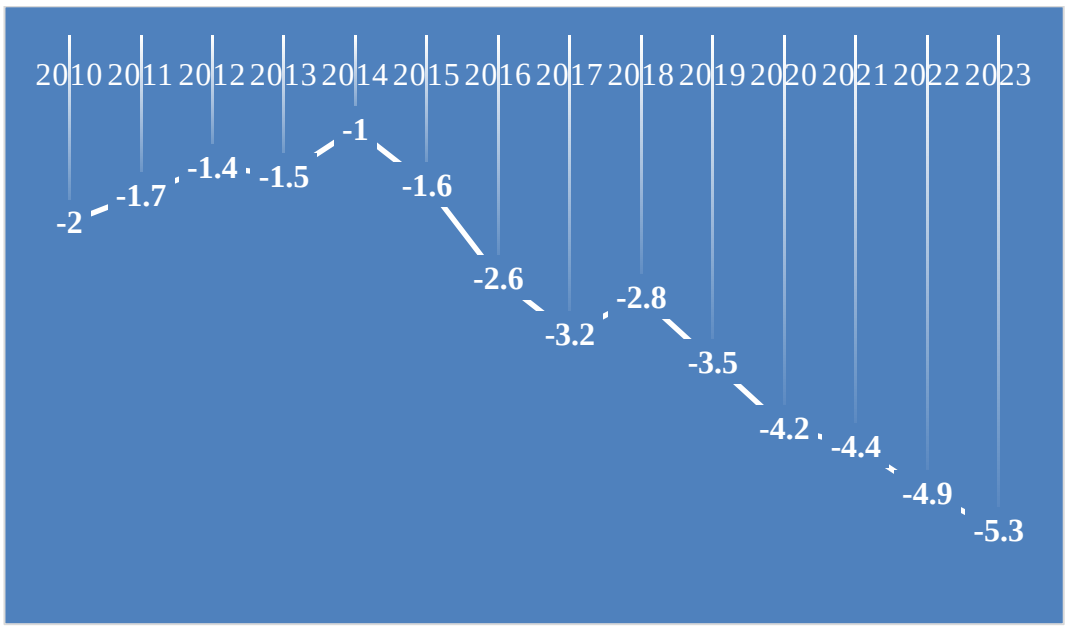
Grafik 3. Pendapatan Pemerintah Nigeria (NGN Miliar)



Sumber: Bank Sentral Nigeria (CBN)

3. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria dapat mendanai defisit anggaran saat ini dan dapat menghasilkan surplus anggaran dalam waktu yang dekat. Kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran dan krisis ekonomi di tahun 2023. Walaupun kebijakan subsidi bahan bakar bukanlah salah satu faktor yang mendorong Nigeria pada krisis ekonomi 2023, tapi kebijakan subsidi bahan bakar telah membuat Nigeria mengalami defisit anggaran dalam 10 tahun terakhir (Harun, et al. 2018, hal 529-534).

Grafik 4. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB Nigeria

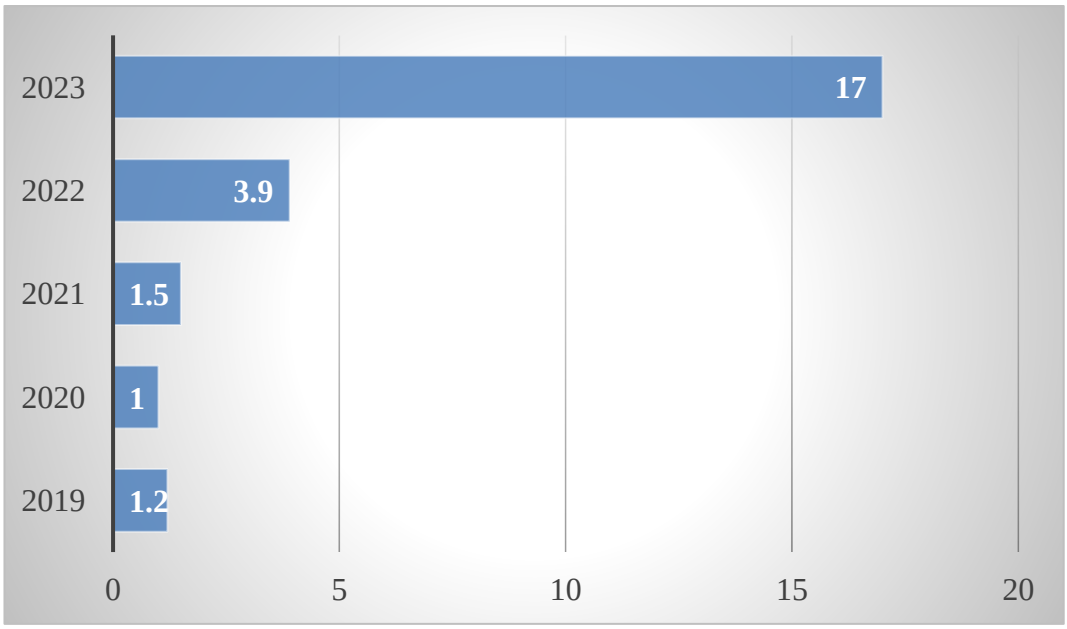


Sumber: Bank Sentral Nigeria (CBN)

Menurut data di atas, rasio defisit anggaran terhadap PDB Nigeria terus berada di area negatif selama lebih dari 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022, subsidi bahan bakar telah menghabiskan anggaran pendapatan negara sebanyak NGN4 triliun dan di tahun 2023 Pemerintah Nigeria kembali mengeluarkan anggaran subsidi sebesar NGN17 triliun. Hal ini berarti menggambarkan bahwasannya subsidi bahan bakar selama lebih dari 10 tahun terakhir telah menghabiskan anggaran sekitar 80 persen dan membuat Nigeria mengalami defisit anggaran yang parah. Selain itu, sekitar 90 persen anggaran pendapatan Nigeria telah digunakan untuk membayar utang luar negerinya yang semakin membuat keadaan perekonomian Nigeria rumit selama adanya kebijakan subsidi bahan bakar. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar merupakan sebuah jalan yang baik untuk Pemerintah Nigeria dalam memperbaiki keuangan Nigeria, karena kebijakan ini dapat mengurangi defisit anggaran Nigeria saat ini sebesar NGN 17 triliun yang

nantinya akan digunakan untuk anggaran nasional dan pembangunan infrastruktur publik lainnya.

Grafik 5. Jumlah Pengeluaran Subsidi Bahan Bakar dalam APBN Nigeria (NGN Triliun)



Sumber: Bank Sentral Nigeria dan NNPC

4. Sejak adanya kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria, Pemerintah Nigeria terus menerus melakukan peminjaman dana ke luar negeri. Tujuan dari adanya utang ke luar negeri adalah untuk melancarkan kegiatan industri bahan bakar di Nigeria, membantu kinerja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi pada nilai tukar mata uang Nigeria. Adanya kebijakan subsidi bahan bakar ini telah memperburuk perekonomian Nigeria sejak tahun 2016 hingga 2020 pasca adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, Pemerintah Nigeria kembali melakukan peminjaman kepada Bank Sentral Nigeria (CBN) dengan cara penyisihan hutang dan pembayaran subsidi. Pemerintah Nigeria sama sekali tidak mempunyai pilihan lain selain meningkatkan hutangnya pada Bank Sentral Nigeria dan

hutangnya dengan luar negeri. Dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria, telah memberikan jalan untuk Pemerintah Nigeria melakukan peminjaman kepada Bank Sentral Nigeria dan luar negeri. Anggaran pendapatan dari adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam kebutuhannya membangun infrastruktur publik (Ozili, Peterson K. dan Obiora, 2023, hal 115-130).

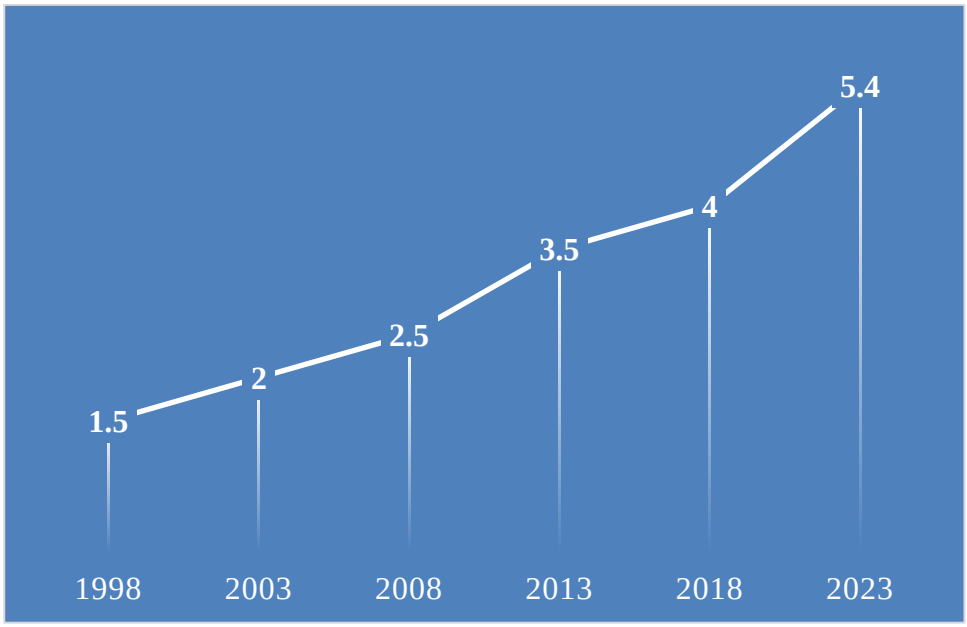
5. Dampak dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria adalah adanya deregulasi total terhadap sektor migas yang memungkinkan untuk meningkatnya perusahaan yang mengimpor bahan bakar dengan harga bersaing. Tujuannya adalah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan akan mempekerjakan pekerja, sehingga akan banyak menciptakan lapangan kerja di Nigeria. Selain itu, Pemerintah Nigeria melakukan renovasi terhadap kilang minyak dalam negeri di Nigeria yang nantinya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Nigeria. Salah satunya kilang minyak ramah lingkungan Dangote yang sudah mulai beroperasi sejak pemerintah melakukan renovasi. Kilang minyak ramah lingkungan Dangote membuka lebih dari 10.000 lapangan kerja langsung di daerah Lagos, dan lebih dari 30.000 lapangan kerja tidak langsung di Nigeria. Sehingga Pemerintah Nigeria dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan meningkatkan lapangan kerja di Nigeria (Olujobi dan Joshua, 2021, hal 1-10).
6. Adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria dapat membantu Pemerintah Nigeria dalam memperkuat nilai tukar mata uang

dan mengurangi adanya tekanan terhadap nilai tukar mata uang Nigeria. Pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan dapat mengizinkan kilang dalam negeri untuk menghasilkan lebih banyak minyak mentah dan produk migas lainnya. Tentu dengan cara seperti ini, Pemerintah Nigeria dapat mengurangi angka impor produk migas dan meningkatkan kegiatan ekspor produk migas yang diproduksi dalam negeri. Sehingga dengan adanya car a ini Pemerintah Nigeria dapat meningkatkan angka devisa negara dari adanya kegiatan ekspor produk migas di dalam negeri. Peningkatan devisa negara ini juga dapat memperkuat nilai tukar mata uang Nigeria yaitu Naira yang lebih baik kedepannya. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah dapat menghemat pengeluaran milliaran dolar pada impor minyak bumi, dan penghematan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi adanya tekanan terhadap nilai tukar mata uang Nigeria dan memperbaiki perekonomian di Nigeria (Akinola dan Adeoye, 2018, hal 231-265).

7. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria tentu akan diikuti dengan adanya pembaharuan kilang-kilang dalam negeri Nigeria, kilang-kilang minyak tersebut dapat memberikan pendapatan dalam negeri untuk memproduksi lebih banyak produk dari migas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Semakin banyak kilang-kilang minyak di Nigeria yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda akan semakin meningkatkan kapasitas kilang-kilang minyak di Nigeria dalam memproduksi bahan bakar dan mengurangi ketergantungan Nigeria terhadap impor bahan bakar (Akinola dan Adeoye, 2018, hal 231-265).

8. Kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria telah banyak mendorong kegiatan ekonomi berbasis bahan bakar fosil yang tentunya meningkatkan polusi udara dan emisi karbon yang ada di Nigeria. Kerusakan alam dan udara yang ada di Nigeria, sebagian besar disebabkan adanya kebijakan subsidi bahan bakar yang mendorong adanya kegiatan tersebut.

Grafik 6. Kerusakan Karbondioksida di Nigeria dari Tahun 1998-2021 (US$ Miliar)



Sumber: World Development Indicators (World Bank)

Menurut basis data di atas ini, Nigeria telah menyumbang US$ 1.5 miliar dari tahun 1998 yang meningkat secara signifikan menjadi US$ 5.4 miliar di tahun 2023. Sehingga dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria dapat membantu mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan upaya Nigeria dalam mengurangi emisi gas rumah kaca global tahun 2030 yang akan datang. Dengan kebijakan ini juga Nigeria juga akan mengurangi adanya permintaan dan pasokan produksi

bahan bakar, demi terwujudnya tujuan Nigeria untuk mengurangi emisi karbon di Nigeria (Omitogun, et al. 2021, hal 21-30).

BAB 3

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH NIGERIA DALAM MENGHENTIKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR TAHUN 2023

Richard C. Snyder dalam teori pembuatan kebijakan (*decision making*) menjelaskan bahwa di dalam perumusan suatu kebijakan oleh pembuat kebijakan (*decision makers*), perlu memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan teori pembuatan kebijakan, seperti faktor internal, faktor struktur sosial masyarakat, faktor proses pengambilan kebijakan, faktor tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*decision makers*), dan faktor ekternal (Snyder, 2002, hal 65-66). Dari faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh Richard C. Snyder merupakan suatu proses yang ada dan saling terhubung dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembuat kebijakan (*decision makers*) atau aktor hubungan internasional lainnya. Pembuat kebijakan atau aktor hubungan internasional perlu mempelajari berbagai faktor dalam merumuskan kebijakan, tujuannya adalah untuk dapat membuat kebijakan yang strategis bagi masyarakat maupun global (Snyder, 2002, hal 86).

Dalam penelitian ini, Pemerintah Nigeria adalah pembuat kebijakan atau aktor hubungan internasional yang memiliki tugas dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi 2023. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Nigeria untuk dapat menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi yang terjadi di Nigeria. Sehingga pemerintah yang memegang kendali terhadap pembuatan kebijakan di Nigeria dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat di Nigeria.

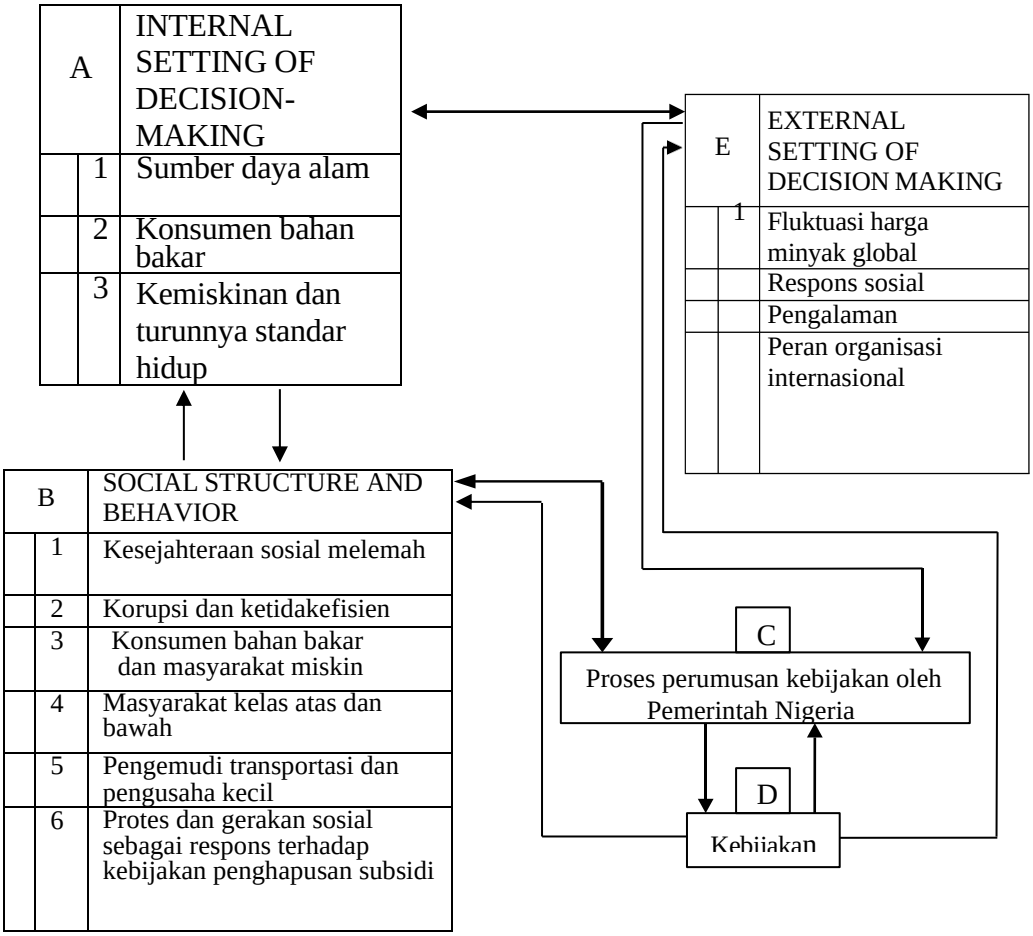
Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar adalah pilihan terbaik yang dilakukan Pemerintah Nigeria untuk dapat menghadapi tantangan krisis ekonomi di tahun 2023. Krisis ekonomi ini telah membuat seluruh aktivitas baik di pemerintahan maupun masyarakat menjadi terganggu. Oleh karena itu, Pemerintah Nigeria sebagai pemangku kepentingan masyarakat Nigeria harus mampu memberikan dampak positif dari adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar tersebut, sehingga Pemerintah Nigeria mampu dalam upaya menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi ini. Konsep teori pembuatan kebijakan (decision making) yang ditulis oleh Richard C. Snyder apabila dihubungkan dengan permasalahan ini, Pemerintah Nigeria sebagai pembuat kebijakan atau aktor hubungan internasional harus dapat mengaitkan sumber daya yang dimiliki Nigeria dengan kebijakan dalam menyelesaikan krisis ekonomi ini (Snyder, 2002, hal 86).

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang dirumuskan oleh Pemerintah Nigeria dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi tersebut. Pembuatan kebijakan ini tentu harus sesuai dengan 5 faktor penting dalam proses pembuatan kebijakan yang ditulis oleh Richard C. Snyder di dalam bukunya. Bab ini kemudian akan menjelaskan 5 faktor penting dalam bentuk sub bab berikut.

Subbab pertama, penulis akan menjelaskan mengenai analisis teori pembuatan kebijakan (*decision making*), kemudian pada subbab kedua penulis akan menjelaskan terkait analisis kerangka studi kasus krisis ekonomi di Nigeria berdasarkan faktor-faktor pembuatan kebijakan yang ditulis oleh Richard Snyder.

3.1 Analisis Teori

Diagram 2. Analisis The Decision Making Model



Sumber: (Snyder, 2002)

Tabel 1. Aplikasi Teori

No	Variabel Teori	Analisis
A	**Faktor Internal (Internal Setting of Decision Making)**	a. ***Non-human environment:*** Nigeria mempunyai sumber daya alam migas yang melimpah, sehingga Pemerintah Nigeria memutuskan untuk fokus di produk bahan bakar tanpa memperhatikan sektor yang lainnya. Namun Pemerintah Nigeria tidak mampu mengekspor minyak olahan dan memilih untuk mengimpor minyak olahan yang membuat krisis ekonomi terjadi pada tahun 2023. Hal

No	Variabel Teori	Analisis
		ini menjadi salah satu bukti bahwa negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak menjanjikan pembangunan ekonomi yang baik. b. **Society:** Masyarakat Nigeria menjadikan subsidi bahan bakar sebagai hak dasar yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Nigeria. c. **Human Environment:** Seluruh masyarakat Nigeria terutama kelompok masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk hidup dan semakin turunnya standar hidup masyarakat di Nigeria. Dengan adanya kebijakan ini, banyak rumah tangga yang harus mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya.
B	**Faktor Struktur sosial dan perilaku masyarakat (Social Structure and Behavior)**	a. **Major Common Value Orientations:** Munculnya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria membuat masyarakat merasa tidak adil dan sangat merugikan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin. Masyarakat tidak terima dengan adanya kebijakan ini yang dianggap pemerintah kurang mampu dalam membuat kebijakan di sektor minyak dan gas. b. **Major Institutional Patterns:** Pemerintah sebagai lembaga yang mengelola subsidi sering diwarnai dengan adanya korupsi dan ketidakefisienan dalam mengelola subsidi. Sehingga semakin memperburuk implementasi dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar.

No	Variabel Teori	Analisis
		c. **Major Characteristics of Social Role Differentiation and Specialization:** Terdapat perbedaan antara kelompok kelas ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah dan bawah yang sangat terdampak oleh kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar. Karena adanya kebijakan ini kelompok masyarakat menengah dan bawah memiliki daya beli yang lebih rendah, sehingga menciptakan jurang yang lebar terhadap ketimpangan dan ketidakpuasan kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah. d. **Groups (Kinds and Function):** Kelompok yang paling terdampak dari adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini adalah pengemudi angkutan umum dan pengusaha kecil. Sebab karena kelompok-kelompok ini telah bergantung pada bahan bakar yang telah disubsidi pemerintah untuk operasional sehari-hari. e. **Relevant Social Processes:** Masyarakat tentu merespons adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini dengan cara mengutarakan bentuk protes dan gerakan sosial lainnya. Dengan adanya bentuk protes dan gerakan sosial ini, masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah, terutama kelompok masyarakat miskin. Reaksi publik ini menjadi bentuk nyata dari proses sosial yang penting dalam mempertimbangkan efektivitas dan

No	Variabel Teori	Analisis
		penerimaan kebijakan di tingkat masyarakat.
C	**Faktor proses pembuatan kebijakan dan aktor pembuat kebijakan (Decision-Making Process and Decision-Makers)**	Proses dalam pembuatan kebijakan untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadi jembatan antara variabel yang berkaitan. Dalam proses ini perlu melibatkan berbagai analisis dari berbagai data ekonomi dan stakeholder yang terkait, terutama Pemerintah Nigeria yang harus mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial dari proses pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini. Sehingga tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang paling efektif dan adil bagi masyarakat Nigeria.
D	**Faktor Tindakan (Actions)**	Pemerintah Nigeria telah membuat berbagai kebijakan terutama kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, tujuannya adalah untuk dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi ini. Implementasi ini tentu melibatkan masyarakat agar dapat menghindari adanya kesalahpahaman di masyarakat. Proses dalam pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar juga memperhatikan adanya kompensasi untuk kelompok masyarakat rentan dan rencana mitigasi lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
E	**Faktor Eksternal (External Setting of Decision Making)**	***a. Non-Human Environment:*** Adanya fluktuasi harga minyak global pada pasar global menjadi pengaruh yang besar terhadap biaya bahan bakar di Nigeria. Sehingga membuat harga bahan bakar di Nigeria menjadi tidak stabil dan semakin memperburuk situasi ekonomi di Nigeria. Serta adanya tren kebijakan energi terbarukan yang membuat Pemerintah

No	Variabel Teori	Analisis
		Nigeria harus mampu mencari sumber pendapatan yang lainnya, dengan tujuan untuk menambah anggaran dan melepas Nigeria dari kebijakan subsidi bahan bakar. ***b. Other Cultures:*** Banyak negara lain yang memiliki pengalaman yang sama dalam membuat kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar. Kemudian bisa menjadi pelajaran bagi Pemerintah Nigeria untuk merespons adanya perubahan maupun keadaan ini. ***c. Other Societies:*** Respons sosial di negara yang memiliki permasalahan yang sama bisa menjadi gambaran bagaimana masyarakat bereaksi terhadap krisis ekonomi ini. Respons sosial ini memiliki berbagai jenis seperti demonstrasi, kampanye sosial media dengan tujuan untuk menarik perhatian global dan menyatukan suara masyarakat. ***d. Societies organized and Functioning as States, Government Action:*** Keanggotaan Nigeria dalam organisasi internasional dan hubungan bilateral dengan negara pengimpor minyak juga dapat memberi pengaruh terhadap kebijakan migas di Nigeria. Kemudian adanya dukungan dari lembaga internasional seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund (IMF)* dapat membantu Nigeria dalam mengimplementasikan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar.

3.2 Analisis Kerangka Studi Kasus

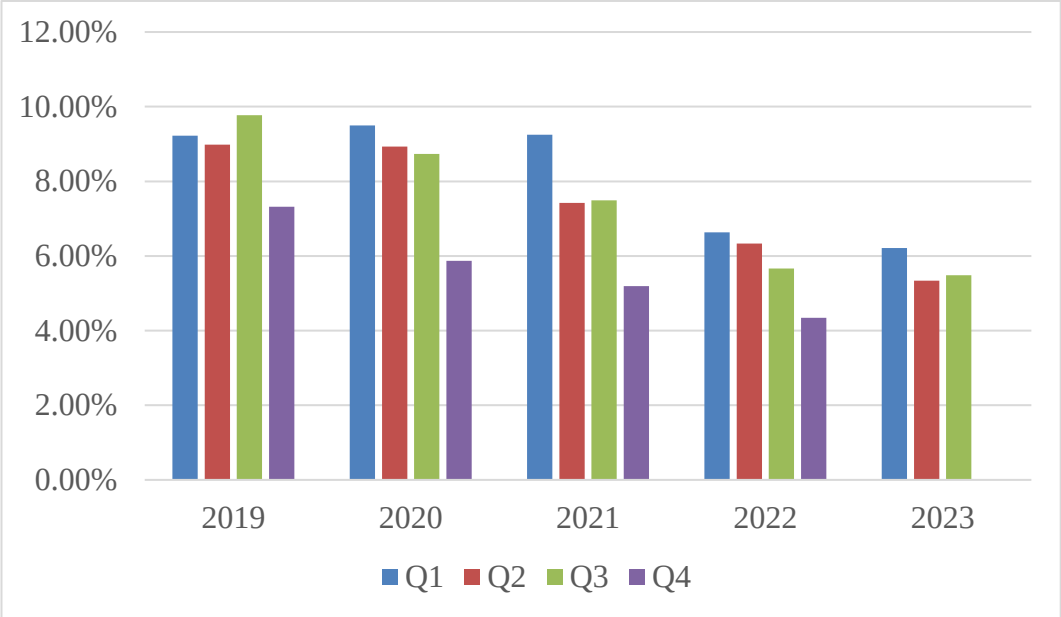
3.2.1 Faktor Internal dalam Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Nigeria

Dalam proses pembuatan kebijakan, faktor internal memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah di suatu negara dalam proses pembuatan kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor internal yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, tujuannya adalah untuk dapat membuat kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Faktor internal juga menjadi indikator yang sangat penting bagi aktor hubungan internasional dalam membuat berbagai kebijakan yang penting untuk menyelesaikan berbagai isu-isu yang terjadi di suatu negara.

Nigeria sedang dihadapi permasalahan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2023, tentu permasalahan ini menjadi permasalahan yang terberat untuk dihadapi oleh Pemerintah Nigeria. Krisis ekonomi ini terjadi dari berbagai faktor yang menyebabkan ekonomi di negara Nigeria runtuh, salah satunya adalah adanya kebijakan subsidi bahan bakar yang sangat menguras pendapatan negara Nigeria. Keadaan ini tentu menjadi semakin memburuk karena Pemerintah Nigeria hanya berfokus pada sektor industri produksi bahan bakar sehingga tidak memperhatikan sektor lainnya yang memiliki potensi untuk menambah anggaran pendapatan negara Nigeria dan masyarakat Nigeria yang telah menjadikan subsidi bahan bakar sebagai hak dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat di Nigeria. Sekitar 40,1 persen masyarakat di Nigeria merupakan kelompok masyarakat miskin, tentu dengan adanya subsidi bahan bakar kelompok masyarakat ini merasa terbantu untuk mencari secercah harapan untuk hidup di setiap harinya, namun semakin

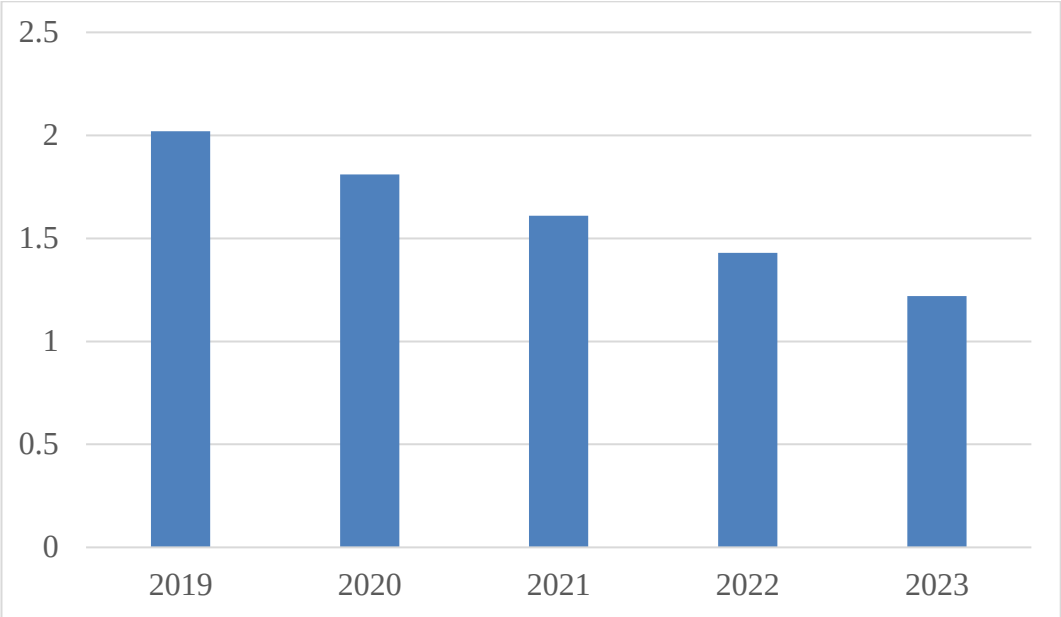
pemerintah terus membayar subsidi bahan bakar terhadap masyarakat, tentunya standar hidup masyarakat di Nigeria akan semakin menurun (National Bureau of Statistics of Nigerian, 2020, hal 5-23).

Grafik 7. Kontribusi sektor minyak dan gas alam terhadap PDB di Nigeria dari kuartal pertama 2019 hingga kuartal ketiga 2023



Sumber: National Bureau of Statistics (2023)

Grafik 8. Produksi Minyak Nigeria dari 2019 hingga 2023 (MBPD)



Sumber: National Bureau of Statistics (2023)

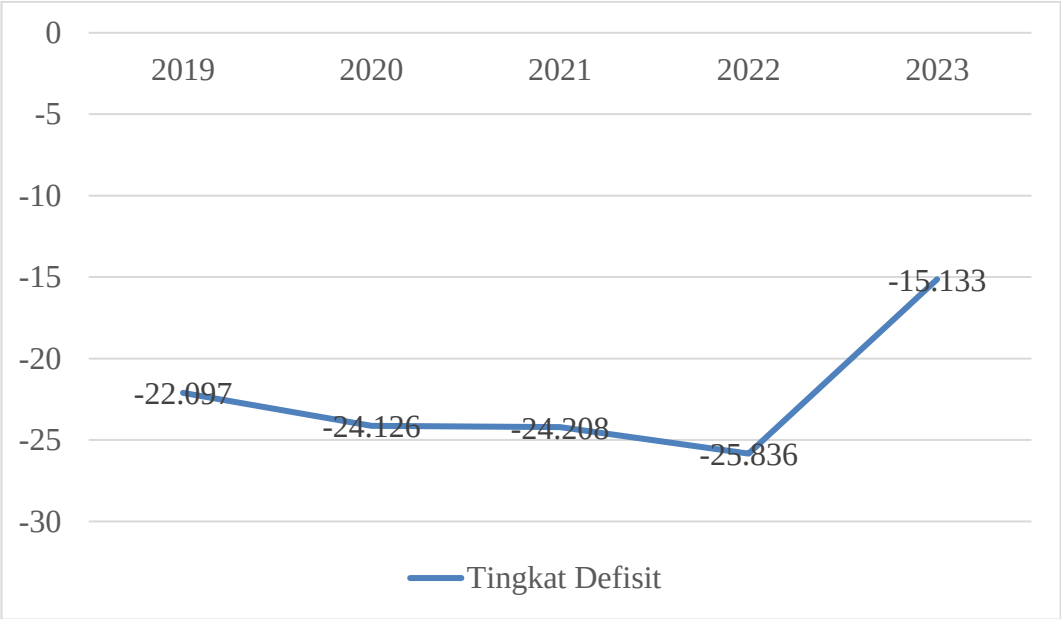
Menurut basis data di atas ini, kontribusi sektor minyak dan gas di Nigeria terhadap PDB telah mengalami fluktuasi yang signifikan. Data ini mencerminkan bahwa ketergantungan besar negara Nigeria terhadap sektor minyak sangat berhubungan erat dengan tantangan yang dihadapi Pemerintah Nigeria dalam menjaga stabilitas ekonomi di tahun 2023. Antara kuartal pertama tahun 2019 dan akhir kuartal ketiga tahun 2023, kontribusi sektor minyak terhadap PDB telah menurun, kerentanan ekonomi ini terjadi karena harga minyak global yang berfluktasi hingga kurangnya investasi dalam infrastruktur sektor migas di Nigeria. Pada kuartal kedua tahun 2023, minyak hanya berkontribusi sebesar 5.34 persen terhadap PDB Nigeria, ini merupakan titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena produksi migas yang menurun menjadi 1.22 juta barel per hari (mbpd) dibandingkan dengan pada kuartal yang sama di tahun 2022 sebesar 1.43 juta barel per hari (mbpd) (Adeniran, 2024).

Penurunan pendapatan terhadap sektor minyak dan gas ini tentunya sangat berdampak pada anggaran pemerintah dan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mempertahankan subsidi bahan bakar, sebab sektor minyak dan gas ini tidak lagi menjadi sektor yang dapat mendanai sektor non-migas lainnya. Tentu dengan berkurangnya pendapatan pada sektor minyak dan gas, pemerintah menghadapi kendala ekonomi yang mendorong adanya kebijakan penghentian subsidi bahan bakar di tahun 2023. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk merelokasi pendapatan ke sektor non-migas lainnya yang dapat memulihkan perekonomian Nigeria (Ibrahim, 2023).

Permasalahan Pemerintah Nigeria saat ini menjadi semakin rumit sebab Pemerintah Nigeria juga sangat bergantung pada impor yang mahal untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bensin. Secara teori, Nigeria memang menjadi negara yang tercatat sebagai produsen minyak dan gas di Afrika (Kohlmann & Schwikowski, 2023). Tetapi Nigeria tidak mampu dalam melakukan kegiatan ekspor minyak olahan dikarenakan kurangnya kilang minyak yang mampu mengubah minyak mentah menjadi minyak olahan. Hal ini terjadi karena adanya salah urus kilang minyak yang ada di Nigeria sehingga menyebabkan empat kilang minyak besar rusak dan tidak beroperasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas kilang minyak, justru di korupsi oleh oknum pemerintah di Nigeria. Kemudian hal inilah yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran Pemerintah Nigeria, pemerintah justru memilih untuk mengekspor minyak mentah dan mengimpor minyak olahan karena dianggap menjadi strategi yang tepat untuk membangun kilang baru. Namun strategi itu justru menjadi kesalahan yang fatal untuk Pemerintah Nigeria, karena strategi tersebut membuat

Nigeria menjadi semakin rentan terhadap fluktuasi harga bahan bakar global dan membuat pengeluaran yang besar untuk membayar harga pasar minyak olahan (Chairawaty, 2009).

Grafik 9. Defisit Anggaran Pemerintah Nigeria (USD Juta)



Sumber: World Bank (2023)

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa defisit anggaran Pemerintah Nigeria dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang konsisten, di mana anggaran tetap dalam kondisi defisit namun terjadi sedikiti perubahan pada persentase GDP. Beriku penjelasannya:

a. Tahun 2019 : Defisit anggaran mencapai -22.097 juta USD dan setara dengan -4.66 persen dari GDP. Defisit ini menggambarkan beban anggaran yang cukup besar, disebabkan adanya berbagai faktor seperti

tingginya pengeluaran untuk program publik, ketidakstabilan harga minyak global (sumber pendapatan utama Nigeria).

b. Tahun 2020 : Defisit anggaran mencapai -24.126 juta USD dan setara dengan -5.58 persen terhadap GDP. Tentu COVID-19 menjadi penyebab utama dari terjadinya defisit anggaran Pemerintah Nigeria yang berusaha untuk meningkatkan kebutuhan di sektor kesehatan dan bantuan sosial lainnya, namun hal ini juga terjadi karena adanya penurunan harga minyak global yang semakin memperburuk defisit.

c. Tahun 2021 : Defisit anggaran pada tahun 2021 sedikit meningkat dari tahun 2020 menjadi -24.208 juta USD, meskipun secara persentasenya terhadap GDP turun menjadi -5.48 persen. Pengeluaran Pemerintah Nigeria masih tergolong cukup tinggi, dimana pada tahun ini situasi ekonomi mulai pulih dan pemerintah dihadapkan dengan pengeluaran tinggi serta pendapatan dari sektor minyak masih belum pulih sepenuhnya.

d. Tahun 2022 : Defisit anggaran kembali meningkat menjadi -25.836 juta USD, persentase terhadap GDP kembali menurun menjadi -5.42 persen. Hal ini terjadi karena pemerintah masih banyak pengeluaran untuk mendukung berbagai program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi di Nigeria.

e. Tahun 2023 : Drefisit anggaran turun secara drastis menjadi -15.133 juta USD atau -4.16 persen terhadap GDP, penurunan ini tentu sangat mencolok dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena Pemerintah Nigeria telah membuat kebijakan untuk mengurangi

beban pengeluaran yang selama ini cukup besar yaitu kebijakan penghentian subsidi bahan bakar. Kebijakan ini terbukti dapat menurunkan total defisit anggaran yang disebabkan adanya pengeluaran subsidi. Meskipun kebijakan ini dapat membantu menurunkan defisit anggaran, dampaknya sangat berpotensi terhadap meningkatnya inflasi dan membebani masyarakat Nigeria, terutama kelompok masyarakat yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi.

Ketergantungan negara Nigeria pada minyak sebagai sumber pendapatan utama dari pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi Nigeria. Sektor minyak menyumbang hampir 50 persen dari pendapatan pemerintah dan 90 persen dari devisa negara Nigeria, tentu hal ini membuat Nigeria sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketergantungan pada sektor minyak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tidak mempertahankan subsidi bahan bakar, karena dengan adanya penghapusan subsidi bahan bakar ini akan membuat keresahan publik yang belum mampu untuk mengelola biaya hidup yang tinggi. Namun, satu sisi hal ini juga membebani pemerintah karena jumlah subsidi yang tiap tahun naik mencapai miliaran dolar per tahun (Evans, et al. 2023, hal 12-32).

Pemerintah Nigeria tentunya telah membuat berbagai keputusan untuk menyikapi permasalahan tantangan krisis ekonomi di tahun 2023. Dalam hal ini untuk menyikapi berbagai faktor-faktor internal tersebut, pemerintah memfokuskan untuk menyimpan anggaran pendapatan negara dengan cara menghapus kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria. Melalui kebijakan ini pemerintah sebagai *decision makers* diharapkan dapat menyelesaikan tantangan tersebut dan dapat

mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat Nigeria dalam situasi krisis ekonomi ini. Faktor-faktor internal ini telah menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Nigeria dalam proses pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, sehingga tujuannya untuk dapat membangun kembali perekonomian Nigeria dan melindungi seluruh kepentingan masyarakat di Nigeria.

3.2.2 Faktor Struktur Sosial dan Perilaku Masyarakat Nigeria

Kepercayaan terhadap pemerintah sangat berhubungan dengan adanya persepsi masyarakat yang menginginkan pemerintah bersedia dan mampu dalam pelaksanaan kebijakan. Subsidi bahan bakar ini muncul karena adanya kombinasi dari faktor ekonomi, sosial dan politik, sehingga pemerintah memperkenalkan subsidi bahan bakar yang menjamin harga bahan bakar di bawah dari harga pasar internasional dengan cara menggunakan anggaran pendapatan negara. Tentunya kebijakan ini dapat perhatian dari seluruh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat atas dan kelompok masyarakat bawah sama-sama mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan ini, walaupun sebenarnya manfaat yang dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin lebih sedikit dibanding kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Munculnya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini tentunya memicu adanya persepsi baru masyarakat terutama masyarakat tidak mampu atau kelompok masyarakat miskin yang merasa tidak adil dan sangat dirugikan (Steadman, et al. 2024, hal 3-50).

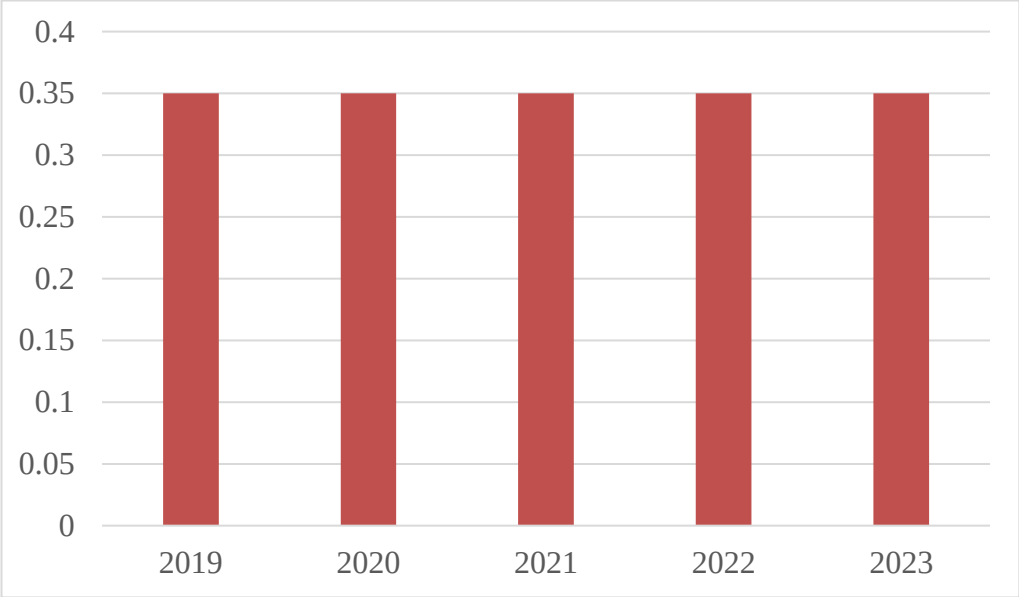
Dalam proses pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini, tentu menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin. Pemerintah sebagai *decision makers* dalam mengelola subsidi ini masih diwarnai dengan adanya tindakan korupsi dan ketidakefisienan dalam

mengelola subsidi (McCulloch, Moerenhout, & Yang, 2021). Sehingga persepsi dari masyarakat ini semakin memicu adanya implementasi yang buruk terhadap kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar. Kelompok yang tentunya sangat berdampak pada kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini adalah pengemudi angkutan umum dan pengusaha kecil lainnya, sebab kelompok ini merupakan kelompok yang sangat bergantung pada subsidi bahan bakar. Dampak negatif yang dialami oleh kelompok masyarakat ini menunjukan bahwa kebijakan subsidi di Nigeria tidak memiliki penilaian terhadap dampak sosial dan tata kelola masyarakat yang berdasarkan keadilan.

Subsidi bahan bakar di Nigeria telah dianggap sebagai hak dasar yang di miliki oleh masyarakat di Nigeria. Dalam studi kasus ini, kebijakan ini disahkan secara langsung oleh Presiden Bola Tinubu setelah ia dilantik pada tahun 2023. Pemerintah pusat mengambil keputusan dari tingkat atas (*Top-down*) sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini. Kebijakan penghentian subsidi bahan bakar ini tentu dianggap sebagai perubahan sepihak oleh kelompok masyarakat sosial, sehingga menimbulkan reaksi protes dari masyarakat serta adanya ketidakstabilan politik akibat adanya kelompok masyarakat yang tidak mendukung kebijakan penghentian subsidi bahan bakar ini (McCulloch, Moerenhout and Yang 2021, hal 2-8). Namun, pendekatan yang dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi kelompok masyarakat miskin ini, pemerintah tidak lepas tangan dengan dampak yang akan diterima oleh masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin. Pemerintah Nigeri merespons dengan berbagai program kompensasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat

dapat bertahan hidup saat menghadapi lonjakan harga pokok dan biaya hidup (Beaton, Clarke, Adeoti, Chete, & Clarke Kieran, 2016).

Grafik 10. Tingkat Ketimpangan Ekonomi Penduduk Nigeria (Gini Coefficient)



Sumber: World Bank (2024)

Menurut data di atas, Nilai yang konstan di 0.35 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun ini, ketimpangan pendapatan di Nigeria tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun dengan berbagai gejolak yang terjadi pada ekonomi Nigeria, distribusi pendapatan tetap tidak berubah dan belum menunjukkan upaya pemerintah dalam kebijakan ekonomi itu berhasil mengurangi ketimpangan. Angka ini juga mencerminkan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang belum berpengaruh besar terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya indikasi bahwa kebijakan fiskal lainnya mungkin diperlukan untuk lebih menargetkan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin. Sehingga resiko ketidakpuasaan sosial pada kelompok masyarakat miskin dapat diselesaikan dengan baik.

Masyarakat Nigeria terutama kelompok masyarakat miskin masih menganggap kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini bersifat menghambat dan merugikan masyarakat, kebijakan ini tentu sangat bertentangan dengan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin. Bahan bakar menjadi peran utama yang sangat mendasar bagi ekonomi dan sosial di Nigeria, karena melalui bahan bakar masyarakat dapat menjamin kehidupannya yang baik. Begitu pula dengan subsidi bahan bakar, masyarakat telah memandang subsidi bahan bakar sebagai upaya dari usaha pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, walaupun pada kenyataannya bahan bakar sering tidak tersedia dengan harga yang tetap. Tapi munculnya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang dibuat oleh Pemerintah Nigeria, justru menimbulkan berbagai bentuk protes terhadap kebijakan ini. Sikap protes ini tentu didasari pada gagasan yang dipromosikan pemerintah melalui subsidi bahan bakar sebagai bentuk bagian dari kontrak sosial di Nigeria (Houeland dan Camilla, 2020, hal 1230-1237).

The Nigeria Labour Congress yang merupakan organisasi federasi serikat buruh di Nigeria dan mewakili suara rakyat Nigeria, terutama kelompok masyarakat menengah dan miskin. Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini dianggap menjadi ancaman yang besar bagi kesejahteraan rakyat Nigeria. Penghapusan subsidi ini menyebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar yang signifikan, tentu yang terdampak adalah kelompok masyarakat menengah dan miskin yang semakin tidak mampu untuk bertahan hidup di Nigeria. Comrade Joe Ajaero mewakili organisasi Nigeria Labour Congress (NLC) dan kelompok masyarakat menengah dan miskin di Nigeria, membuat Press Statement yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Nigeria terhadap kebijakan penghapusan

subsidi bahan bakar tahun 2023. Berikut bagian-bagian penting yang disampaikan oleh Comrade Joe Ajaero:

1. Masyarakat Nigeria menganggap Presiden Bola Tinubu tergesa-gesa dalam membuat keputusan penghapusan subsidi bahan bakar tanpa memikirkan dampak yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentu telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi hingga kenaikan harga yang mencapai 300 persen.
2. Masyarakat Nigeria menganggap keputusan ini membawa penderitaan yang besar bagi jutaan masyarakat Nigeria. Kehidupan menjadi menurun drastis dengan adanya kenaikan biaya hidup yang tinggi.
3. Masyarakat Nigeria sangat kecewa dengan Presiden Bola Tinubu, beliau pernah mengatakan bahwa kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini merupakan suatu kebijakan yang berbahaya bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Nigeria.
4. Pemerintah Nigeria dianggap lebih mementingkan penghematan anggaran daripada kesejahteraan rakyat Nigeria, sementara kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini akan mengurangi semua kegiatan ekonomi.
5. Masyarakat Nigeria mendesak dan protes kepada Presiden Bola Tinubu untuk menghormati prinsip-prinsip ekonomi yang telah dibuat, Masyarakat memandang kebijakan ini sebagai penghancur kesejahteraan rakyat Nigeria.

Bagian-bagian di atas ini, secara tegas disampaikan oleh Comrade Joe Ajaero untuk menggambarkan penolakan masyarakat Nigeria terhadap kebijakan

penghapusan subsidi bahan bakar yang dianggap tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat Nigeria dan memperburuk perekonomian rakyat kecil di Nigeria (Nigeria Labour Congress, 2023).

Sebagai perbandingan, pada tahun 2014 Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan kebijakan yang serupa terkait penghapusan subsidi bahan bakar. Langkah ini diambil Pemerintah Indonesia untuk mengurangi beban anggaran negara, mengalokasikan dana untuk infrastruktur, dan pembangunan sosial yang lebih luas. Tentu demikian, kebijakan ini memicu kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok yang meningkat, sehingga dengan adanya kebijakan ini meningkatkan biaya hidup masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi respons sosial ini, Pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan program bantuan langsung tunai (BLT) dan program subsidi yang lebih terukur terhadap sektor-sektor yang lebih rentan. Kebijakan kompensasi inilah yang akhirnya dapat mengurangi dampak negatif pada kelompok masyarakat miskin dan mendorong adanya dukungan publik terhadap kebijakan reformasi (Maesaroh, 2022).

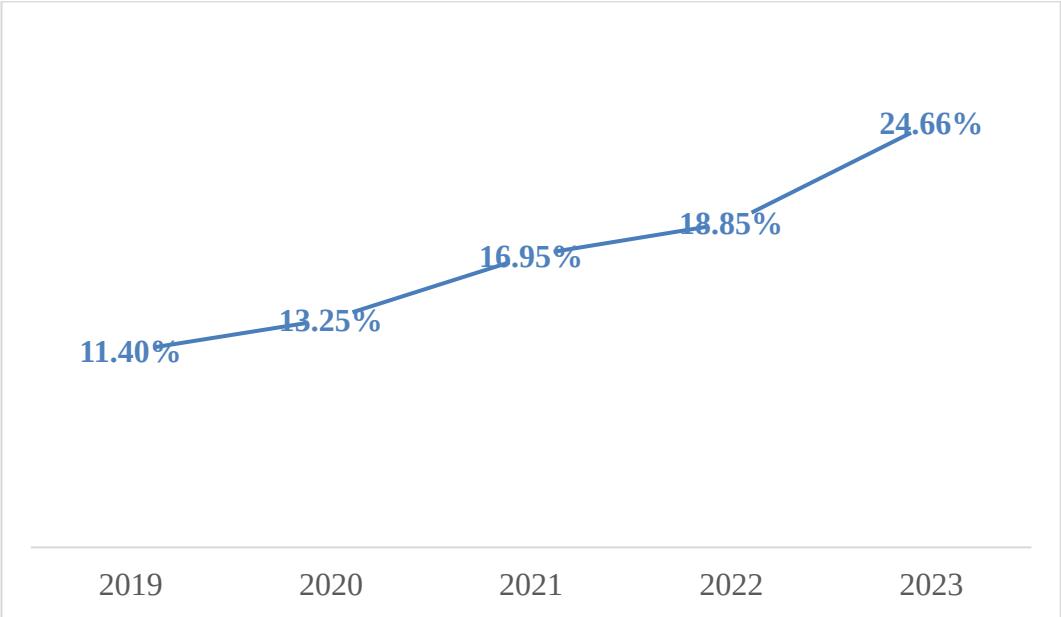
Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini tentu memicu respons sosial yang tidak puas dengan adanya kebijakan ini, terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dibandingkan dengan Nigeria, respons sosial di Indonesia cenderung lebih terkendali karena Pemerintah Indonesia dapat menjaganya dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan. Perlu adanya keseimbangan antara faktor internal seperti respons sosial dan pemerintah yang siap memainkan peran krusial dalam menentukan respons sosial yang muncul.

Pemerintah Nigeria dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini telah menargetkan berbagai tujuan untuk pembangunan ekonomi dan sikap Pemerintah Nigeria untuk memberantas korupsi. Pemerintah tentu sangat berharap kepada masyarakat di Nigeria untuk tetap mendukung adanya kebijakan ini yang tujuannya adalah untuk memulihkan Nigeria dari krisis ekonomi pada sektor sosial dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah juga berharap kepada seluruh kelompok masyarakat di Nigeria untuk menciptakan situasi sosial masyarakat yang mendukung, sehingga implementasi dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam mencapai semua tujuan ini pemerintah sangat membutuhkan adanya peran dan hubungan sosial masyarakat Nigeria yang baik.

3.2.3 Faktor Proses Pembuatan Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Nigeria

Dalam buku Foreign Policy Decision-Making, Richard Snyder menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan (*decision making process*) adalah sebuah faktor yang dapat menghubung antara faktor internal dan faktor eksternal (Snyder, 2002, hal 65-66). Dalam proses pembuatan kebijakan ini, setiap aktor hubungan internasional memiliki peran yang penting dan untuk selalu diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya proses pembuatan kebijakan ini kemudian sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor hubungan internasional dapat menjadi alat untuk menyelesaikan berbagai polemik di berbagai sektor.

Grafik 11. Tingkat Inflasi Nigeria dari Tahun 2019 - 2023



Sumber: World Bank (2024)

Pada data di atas, menunjukkan bahwa tingkat inflasi meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Kenaikan pada tingkat inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, sebagai berikut:

a. Tahun 2019 – 2020 : Tingkat inflasi meningkat dari 11.40 persen pada tahun 2019 menjadi 13.25 persen pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 1.85 persen. Data ini mengidentifikasikan bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, politik, dan peningkatan biaya impor.

b. Tahun 2020 – 2021 : Tingkat inflasi naik lagi menjadi 16.95 persen dengan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3.71 persen. Peningkatan ini menunjukan bahwa tekanan inflasi di Nigeria semakin kuat, penyebabnya adalah Nigeria harus menghadapi tantangan dalam rantai pasokan global, ketergantungan terhadap impor, dan dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi global tidak stabil.

c. Tahun 2021 – 2022 : Tingkat inflasi pada tahun 2022 mencapai 18.85 persen, pada tahun ini kenaikan masih dikategorikan lebih kecil daripada tahun sebelumnya, namun inflasi masih berada pada tingkat yang tinggi. Penyebab dari naiknya inflasi pada tahun ini adanya indikasi lanjutan dan tekanan ekonomi dari tahun sebelumnya, terutama di sektro yang sangat terpengaruh oleh harga migas dan pangan.

d. Tahun 2022 – 2023 : Pada tahun 2023, tingkat inflasi mencapai 24.66 persen, dengan kenaikan hingga 5.81 persen dari tahun 2022. Lonjakan ini mencerminkan kondisi inflasi yang semakin parah, hal ini terjadi disebabkan adanya peningkatan harga minyak global, pelemahan mata uang Naira Nigeria, ketidakstabilan ekonomi dan politik, hingga munculnya kebijakan tentang penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria tahun 2023.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Nigeria menghadapi tantangan inflasi yang semakin besar dari tahun ke tahun. Tercatat lonjakan terbesar yang terjadi pada tahun 2023, sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga Nigeria, dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Krisis ekonomi yang terjadi di Nigeria perlu adanya sikap yang tegas dan terukur dari aktor yang mempunyai kewenangan dalam membentuk sebuah kebijakan agar tantangan krisis ekonomi ini dapat di atasi dengan cepat. Pemerintah Nigeria dalam hal ini yang merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi situasi ini, termasuk proses pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria.

Dalam proses ini juga perlu adanya peran dari berbagai institusi dan lembaga negara untuk dapat bekerjasama dalam menyelesaikan situasi krisis tersebut. Sehingga dengan adanya peran dari pemerintah dan lembaga atau institusi negara dapat memberikan hasil yang positif agar terwujudnya negara Nigeria yang dapat dikendalikan dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut.

Pemerintah pusat pada suatu negara merupakan aktor yang memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, sehingga dengan adanya pemerintah pusat dapat membuat keputusan yang penting terkait berbagai kebijakan yang ada pada negaranya. Namun, tentunya peran pemerintah pusat tidak akan mampu berjalan dengan baik sendirinya, peranan pemerintah pusat membutuhkan adanya hubungan dengan institusi yang terkait agar dapat membuat keputusan pada kebijakan. Terutama pada persoalan krisis ekonomi yang terjadi di Nigeria, pemerintah pusat harus mampu bekerjasama dengan lembaga negara yang terkait pada isu ini, sehingga dengan dilibatkannya peran dari lembaga yang terkait, pemerintah pusat dan lembaga negara yang terkait dapat menyelesaikan tantangan krisis ekonomi ini lebih maksimal.

Krisis ekonomi terjadi akibat adanya ketergantungan Nigeria pada pendapatan ekspor minyak, namun anggaran pendapatan dari ekspor minyak ini tidak mencapai garis keberhasilan pemerintah dalam membangun ekonomi Nigeria yang baik. Pemerintah Nigeria perlu menguras anggaran untuk subsidi bahan bakar di Nigeria, tujuannya adalah agar bahan bakar dapat dipenuhi oleh masyarakat Nigeria dalam menjalani aktivitasnya disetiap hari. Subsidi bahan bakar telah menjadi hak yang mendasar bagi masyarakat Nigeria, sehingga pemerintah terus menerus mengeluarkan anggaran untuk subsidi bahan bakar di Nigeria. Pada

akhirnya, Pemerintah Nigeria mengeluarkan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar untuk mengurangi adanya beban anggaran. Meskipun sebenarnya tujuan dari kebijakan ini sangat baik untuk jangka panjang dalam memperbaiki ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Nigeria, dalam jangka pendek pemerintah harus menerima adanya kenaikan harga bahan bakar yang akhirnya memicu adanya krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Dalam proses pembuatan kebijakan pengapusan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan lembaga yang terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menganalisis anggaran Nigeria dan ekonomi secara keseluruhan. Karena beban anggaran yang disebabkan oleh adanya subsidi bahan bakar ini memicu adanya pengurangan pengalokasian dana untuk sektor-sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur (Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning, 2021). Pemerintah Nigeria juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Kerjasama ini dilakukan pemerintah untuk mendapatkan perspektif yang luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, industri energi, hingga stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan ini (Mabogunje dan Akin L, 2010).

International Monetary Fund (IMF) dan World Bank secara langsung menyetujui Pemerintah Nigeria dalam menghentikan subsidi bahan bakar untuk menstabilkan ekonomi Nigeria dan menghindari pinjaman yang berlebihan. Pemerintah Nigeria bersama IMF dan World Bank memiliki poin yang sama dalam terwujudnya kebijakan ini, bahwa subsidi hanya menguntungkan kelompok

masyarakat atas dan sangat diperlukan untuk memerangi korupsi yang terjadi di Nigeria (Steadman, et al., 2024). Bentuk nyata lainnya dari dukungan World Bank adalah adanya bantuan program sosial nasional Nigeria sebesar $800 juta (World Bank, 2023b).

Kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini juga dibuat untuk menghilangkan berbagai paradoks tentang kekayaan minyak di Nigeria yang menghasilkan korupsi yang besar, kemiskinan yang parah, distribusi pendapatan yang terpecah dan kinerja ekonomi yang semakin memburuk (Obasi, Ezenkwa, Onwa, & Nwogbaga, 2017). Dampak jangka pendek dari proses pembuatan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, Kementerian Keuangan bersama Pemerintah Nigeria menghasilkan program lainnya yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat Nigeria dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi ini, seperti jaminan sosial bagi pengangguran, program kredit konsumen sosial, program pendanaan sosial (NGN 25.000 untuk 12 juta rumah tangga) (Erezi, 2024). Selain langkah-langkah yang dibuat oleh pemangku kepentingan ini, tentunya diperlukan adanya strategi jangka panjang untuk pengalokasian anggaran dari penghapusan subsidi bahan bakar ke dalam pembangunan sektor-sektor lainnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur publik yang memadai (Yusuf, 2023).

Pendekatan Pemerintah Nigeria yang *top-down* ini menegaskan bahwa kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini tetap diambil adalah untuk menghadapi krisis ekonomi dan memperbaiki perekonomian Nigeria. Subsidi bahan bakar dianggap menjadi beban untuk anggaran negara sehingga pemerintah perlu cara untuk mengurangi adanya defisit anggaran tersebut dan mengalokasikan

dana ke pembangunan. Meskipun pemerintah menyadari adanya potensi dampak sosial, namun pemerintah tetap lebih fokus untuk jangka panjang bagi perekonomian negara, Pemerintah Nigeria juga merespons dengan menawarkan bantuan sosial. Sehingga hal ini semestinya harus didukung oleh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan di Nigeria dalam proses pembuatan kebijakan, karena tujuannya adalah untuk terwujudnya tujuan negara yang maksimal dan masyarakat yang sejahtera (Damania, Richard, Balseca, & De Fontaubert, 2023).

3.2.4 Faktor Tindakan Pemerintah Nigeria dalam Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi di Nigeria pada tahun 2023 merupakan fenomena krisis yang terbesar dalam sejarah Nigeria. Krisis ekonomi ini membuat semua aktivitas baik di pemerintahan maupun masyarakat lumpuh dikarenakan perekonomian di Nigeria sedang menghadapi tantangan krisis. Kejadian ini memang banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah adanya kebijakan subsidi bahan bakar. Subsidi bahan bakar ini telah berlangsung lama diberlakukan oleh Pemerintah Nigeria untuk dapat mengakomodasi masyarakat dalam penggunaan bahan bakar di Nigeria, sehingga subsidi bahan bakar ini sudah menjadi hak dasar yang wajib dimiliki seluruh masyarakat di Nigeria (Elinwa, Ogbeba dan Agboola, 2021, hal 100-103).

Mayoritas masyarakat di Nigeria menggunakan bahan bakar sebagai mata pencaharian, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan kelompok masyarakat miskin. Namun dampak dari adanya kebijakan subsidi bahan bakar ini semakin membuat perekonomian Nigeria hancur. Sehingga hal ini membuat situasi sosial di Nigeria tidak dapat dikendalikan. Kelompok masyarakat miskin menaruh harapan yang besar kepada pemerintah untuk dapat mencari solusi

untuk mengatasi situasi sulit ini dengan lebih memperhatikan kelompok masyarakat miskin.

Pada bulan Mei 2023, Presiden Nigeria yang baru ditetapkan, Bola Tinubu. Mengakhiri subsidi bahan bakar di Nigeria dengan menyatakan bahwa pemerintah saat ini sudah tidak mampu untuk menanggung biaya subsidi yang semakin meningkat. Presiden Bola Tinubu menyadari bahwa beban subsidi pada anggaran terlalu tinggi, Nigeria menghabiskan 10 miliar USD (NGN 4 triliun) tahun 2022 hanya untuk mensubsidi bensin, tentu pengeluaran ini lebih besar empat kali lipat dibandingkan anggaran kesehatan (NGN 827 miliar). Presiden Bola Tinubu menyakini bahwa dengan adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar mampu menjaga sektor-sektor lainnya dapat berjalan dengan baik (International Institute for Sustainable Development, 2023). Subsidi bahan bakar di seluruh dunia tanpa terkecuali Nigeria telah banyak menguras anggaran pendapatan negara, memperlebar adanya defisit anggaran pendapatan, kontribusi yang besar terhadap pencemaran lingkungan dan iklim, menghambat masuknya laju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, serta mengurangi ketersediaan anggaran untuk investasi di sektor lainnya (Steadman, et al., 2024).

Kebijakan subsidi bahan bakar ini sangat sulit untuk direformasi, namun bukan berarti kebijakan subsidi bahan bakar ini tidak bisa digantikan. Suatu kebijakan yang berhasil itu bergantung adanya penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen dan kemampuan pemerintah dalam upaya perlindungan sosial dan kompenasasi serta distribusi anggaran subsidi yang tepat sasaran untuk masyarakat yang benar-benar terdampak dengan adanya situasi ini (Houeland dan Camilla, 2020, hal 1230-1237). Saat ini Pemerintah Nigeria telah

melaksanakan bantuan untuk menghadapi krisis ekonomi ini. Beberapa bantuan tersebut meliputi:

A. Bantuan redistribusi anggaran kepada kelompok masyarakat miskin
B. Bantuan distribusi bahan makanan
C. Bantuan penyediaan layanan transportasi umum tambahan
D. Bantuan kenaikan gaji bagi sejumlah pegawai sektor publik dan pensiunan
E. Bantuan tunai

Terkait dengan bantuan tunai, Bank Dunia telah melakukan pencairan pinjaman sebesar $800 juta untuk peningkatan program jaring pengamanan sosial nasional (NSSP-SU). Maksudnya, untuk mendukung program bantuan tunai pemerintah federal. Target jangka pendek yang akan dicapai pemerintah pada bantuan tunai ini akan menjangkau 15 juta rumah tangga dengan bantuan tunai sebesar NGN 25.000 dalam tiga bulan pertama di tahun 2024 (World Bank, 2023b).

Reaksi dari masyarakat Nigeria terhadap berbagai bantuan dari Pemerintah Nigeria ini menimbulkan reaksi yang acak, dimana masyarakat menerima ini masih sebagai harapan akan peningkatan kesejahteraan yang dapat membuat masyarakat Nigeria mampu bertahan hidup ditengah biaya hidup yang meningkat. Namun beberapa masyarakat lagi tentu masih menanggapi bantuan dari Pemerintah Nigeria ini dengan skeptisme, terutama pada kemampuan pemerintah untuk mendistribusikan dana secara tepat sasaran dan transparan. Tentu hal ini timbul karena adanya resiko korupsi dan kurangnya akuntabilitas dalam mendistribusi bantuan sosial di masa lampau. Kekhawatiran ini juga timbul dari masyarakat Nigeria yang masih bertanya-tanya, apakah kebijakan penghapusan subsidi bahan

bakar ini dapat menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang. Masyarakat Nigeria juga menyoroti perlunya Pemerintah Nigeria yang memperhatikan kembali sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang memadai, agar kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tindakan yang dibuat oleh Pemerintah Nigeria merupakan hasil dari adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Nigeria dan Institusi terkait di Nigeria. Pengambilan keputusan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar ini tentu berdasarkan adanya faktor-faktor dari terjadinya krisis ekonomi di Nigeria dengan memperhatikan beberapa petunjuk dalam pengambilan keputusan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Pada tahun 2023, secara bersamaan dengan adanya kebijakan penghentian subsidi bahan bakar di Nigeria. Pemerintah Nigeria telah merumuskan berbagai kebijakan lain untuk mengurangi dampak negatif dari adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang dibuat di sektor-sektor lainnya. Berikut kebijakan lain yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Nigeria beserta institusi terkait dalam upaya menangani krisis ekonomi:

Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Nigeria

No.	Lembaga Pemerintah	Kebijakan
1.	Kementerian Keuangan Federal	a. Kebijakan fiskal dan anggaran yang berfokus pada stabilitas fiskal dan transisi. Kebijakan ini termasuk stabilitas makroekonomi, pengembangan SDM, ketahanan pangan, peningkatan lingkungan investasi, hingga peningkatan industrialisasi termasuk UKM.

No.	Lembaga Pemerintah	Kebijakan
		b. Memperketat kebijakan moneter untuk mengendalikan krisis ekonomi dengan cara mendesain ulang uang kertas Naira Nigeria. Tujuannya adalah untuk mengurangi penimbunan uang tunai dan memperbaiki stabilitas nilai tukar mata uang Naira. c. Meningkatkan pendapatan dari sektor non-migas dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan migas. d. Mengatur rancangan utang dan pembiayaan defisit untuk mendanai pembangunan infrastruktur publik.
2.	Kementerian Lingkungan Hidup Federal	a. Meningkatkan penggunaan dan daur ulang sumber daya secara efisien guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih. b. Mempromosikan penggunaan pada energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Sehingga komitmen Nigeria “Net Zero Emission” tahun 2060 dapat tercapai. c. Mengembangkan rencana aksi nasional bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Rencana ini memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan baik yang disebabkan merkuri.
3.	Kementerian Pendidikan Federal	Membuat undang-undang pinjaman mahasiswa baru untuk memperoleh pinjaman pembayaran biaya kuliah. Sehingga dengan adanay kebijakan ini pendidikan tinggi dapat dijangkau dan memberikan akses kepada semua warga Nigeria.
4.	Kementerian Kesehatan Federal	Memperluas akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan

No.	Lembaga Pemerintah	Kebijakan
		kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi.
5.	Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Federal	Mendukung sektor produksi pangan domestik dengan memperkuat ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani-petani di Nigeria. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
6	Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Federal	Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional.
7.	Kementerian Pertambangan dan Pengembangan Baja	Mengembangkan sektor pertambangan dan baja untuk dapat menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Nigeria.

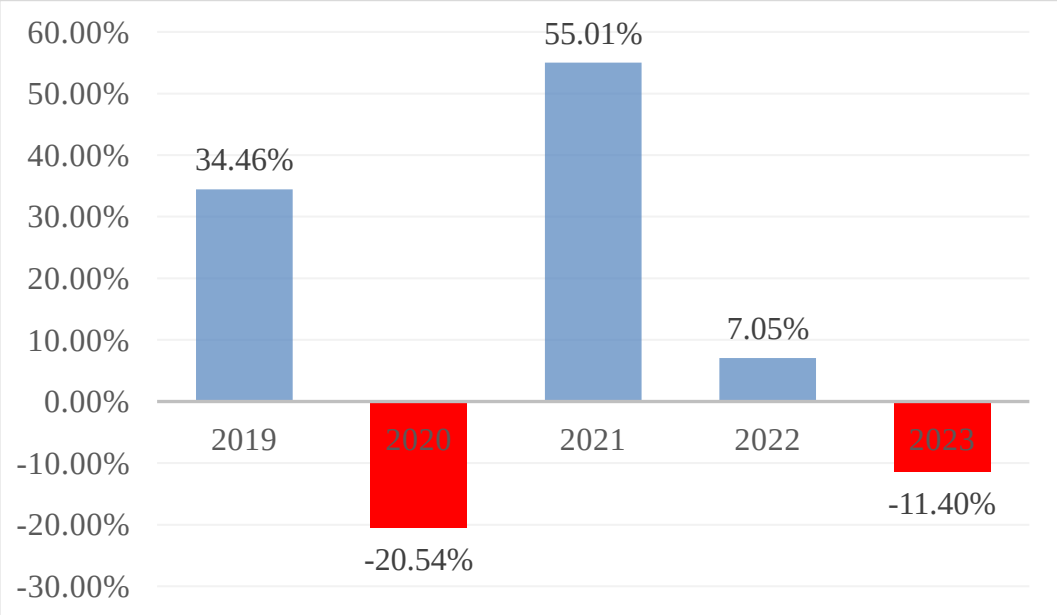
3.2.5 Faktor eksternal dalam pengambilan kebijakan krisis ekonomi Nigeria

Faktor eksternal ini menjadi faktor terakhir dalam proses pembuatan kebijakan yang dirumuskan oleh Richard Snyder didalam bukunya. Faktor eksternal ini juga tentunya sangat penting bagi aktor hubungan internasional dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga faktor eksternal ini saling terhubung dengan faktor internal. Dalam proses pembuatan kebijakan, keadaan internal dan eksternal di mata aktor hubungan internasional merupakan suatu hal yang penting bagi keikutsertaan negara dalam mewujudkan dunia yang adil dan damai.

Proses pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal suatu negara, tetapi juga adanya pengaruh eksternal dari lingkungan internasional dan aktor-aktor yang berinteraksi dengan negara tersebut. Dalam studi kasus ini, dinamika harga minyak global sangat mempengaruhi kebijakan subsidi di Nigeria. Negara ini merupakan produsen minyak utama yang ada di Afrika, tentu peran dari

Nigeria sangat terpengaruh oleh harga minyak global yang berubah. Ketika harga minyak jatuh, pendapatan dari eskpor minyak Nigeria akan turun drastis. Penurunan harga ini menjadikan faktor eksternal yang menekan adanya pengeluaran anggaran yang cukup besar dan membuat kebijakan subsidi bahan bakar sulit untuk dipertahankan. Dengan berkurangnya pendapatan dari ekspor minyak, Pemerintah Nigeria akan kehilangan sumber dana pendapatan yang mendanai subsidi, sehingga memaksa pemerintah untuk mengurangi beban subsidi hingga menghapusnya (International Monetary Fund. African Dept., 2022).

Grafik 12. Tren Harga Minyak Global dari Tahun 2019 - 2023



Sumber: Macrotrends (2024)

Menurut data di atas, menunjukkan bahwa tren harga minyak global mengalami ketidakstabilan dari tahun 2019 hingga 2023. ketidakstabilan pada tren harga minyak global ini disebabkan oleh berbagai faktor, sebagai berikut:

a. Tahun 2019 : Harga minyak global meningkat hingga 34.46%. Kenaikan ini dipengaruhi adanya beberapa faktor eksternal, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, seperti ketegangan antara

Amerika Serikat dan Iran, serta kesepakatan OPEC untuk membatasi produksi minyak yang bertujuan untuk menstabilkan harga tetap tinggi. Selain itu kenaikan harga ini membantu Nigeria dalam meningkatkan pendapatan terhadap ekspor minyak.

b. Tahun 2020 : Harga minyak global menurun hingga -20.54%. Penurunan ini disebabkan sebagian besar oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tajam dalam permintaan global. Kejatuhan harga minyak ini berdampak buruk terhadap Nigeria, yang mengalami adanya penurunan terhadap ekspor minyak.

c. Tahun 2021 : Harga minyak global kembali meningkat dengan tajam sebesar 55.01%. hal ini disebabkan adnaya pemulihan ekonomi global pasca-pandemi, terutama di negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China, sehingga permintaan ekspor minyak kembali mengalami peningkatan.

d. Tahun 2022 : Harga minyak global mengalami kenaikan sebesar 7.05%. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya potensi peningkatan pada harga minyak seperti adanya invasi Rusia ke Ukraina, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap harga minyak global. Sehingga membuat OPEC mengeluarkan kebijakan untuk lebih berhati-hati dalam membatasi produksi minyak, dan juga pada tahun 2022 banyak kekhawatiran yang terjadi diakibatkan adanya isu resesi global di beberapa negara.

e. Tahun 2023 : Harga minyak global mengalami penurunan hingga -11.40%. Penurunan ini terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap

melambatnya pertumbuhan ekonomi global terutama di Eropa, sehingga hal ini mempengaruhi adanya pengurangan terhadap permintaan ekspor minyak. Penurunan harga minyak global pada tahun 2023 ini sangat memberikan dampak negatif kepada Nigeria, sebab Nigeria sangat bergantung pendapatannya pada sektor ekspor minyak. Sehingga menyebabkan Pemerintah Nigeri mengeluarkan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

Nigeria sangat bergantung pada pasar global, sebab kegiatan ekspor minyak mentah dan impor minyak olahan sangat mempengaruhi pendapatan Nigeria di sektor minyak. Ketidakstabilan harga minyak global membuat Pemerintah Nigeria harus dapat beradaptasi sesuai dengan kondisi pasar minyak global. Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren global yang menunjukkan untuk peralihan ke energi terbarukan, negara-negara penghasil minyak ditekankan untuk melakukan perubahan guna menghindari ketergantungan. Dengan berbagai isu permasalahan yang terjadi di global, Nigeria diharapkan mampu untuk mencari sumber pendapatan lain dan mengurangi pengeluaran terhadap subsidi bahan bakar yang tidak produktif. Kebijakan energi global ini juga menunjukkan bahwa Nigeria bukan hanya berhadapan dengan masalah subsidi sebagai isu domestik, tetapi juga sebagai bagian dari tekanan dan perubahan tren global (Adebayo, 2023).

Krisis ekonomi di Nigeria tentu telah menjadi perhatian bagi dunia internasional, sebab negara yang kaya akan sumber daya migas, saat ini tengah dihadapkan dengan tantangan krisis ekonomi. Kondisi ini juga yang akhirnya membuat Pemerintah Nigeria harus mencari berbagai cara untuk menangani kasus ini dengan cepat dan optimal. Krisis ekonomi ini terjadi karena ketergantungannya

Nigeria terhadap pendapatan di sektor migas dan adanya kebijakan subsidi bahan bakar yang membuat Pemerintah Nigeria tidak bisa mengembangkan sektor-sektor lainnya (Chinery dan Ikoli, 2022). Sehingga Pemerintah Nigeria akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar untuk upaya menanagani krisis ekonomi yang telah merusak kesejahteraan masyarakat Nigeria.

Selain fokus Pemerintah Nigeria untuk menjamin terwujudnya hak asasi masyarakat Nigeria, Pemerintah Nigeria saat ini tengah fokus ke arah yang lebih lanjut yaitu pencapaian Nigeria terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 9 yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Pada poin ini memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur publik yang maju, meningkatkan industri yang berkelanjutan dan mendorong adanya inovasi. Sehingga peran dari kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar sangat penting bagi Pemerintah Nigeria untuk memulihkan Nigeria dari krisis ekonomi (United Nations Nigeria, 2022). Berikut sasaran tujuan poin 9 Pemerintah Nigeria dalam mewujudkan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs):

1. Mengembangkan infrastruktur publik yang maju, bermanfaat, dan berkelanjutan termasuk infrastruktur regional dan lintas batas Nigeria. Sasaran ini untuk mencapai tujuan Nigeria dalam mendukung Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nigeria. Sehingga dengan sasaran ini dapat memberikan akses yang terjangkau dan tepat sasaran untuk seluruh masyarakat.
2. Mendorong adanya industrialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pangsa lapangan kerja di Nigeria dan produk domestik bruto industri. Saat

ini Pemerintah Nigeria tengah dihadapi kurangnya pembangunan di sektor non-migas, harapannya dengan adanya sasaran ini dapat menghidupkan kembali sektor-sektor yang kurang berkembang.

3. Meningkatkan akses industri skala kecil dan perusahaan lainnya, khususnya di Nigeria sendiri masih terdapat industri skala kecil yang masih sulit untuk berkembang. Sehingga dengan sasaran ini Pemerintah Nigeria dapat mengakomodasi akses layanan keuangan seperti kredit yang terjangkau.
4. Nigeria menuju pembangunan infrastruktur dan industri berkelanjutan tahun 2030. Pada sasaran ini Pemerintah Nigeria berupaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penggunaan terhadap teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan.

Dari beberapa fokus Pemerintah Nigeria di atas, saat ini Pemerintah Nigeria masih sangat kesulitan untuk mewujudkannya di tengah situasi yang sulit bagi pemerintah akibat adanya krisis ekonomi dan faktor lainnya seperti kondisi sosial yang masih belum terkendali karena adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar. Sehingga, dalam proses pembuatan kebijakan untuk menangani krisis ekonomi ini, Pemerintah Nigeria perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi internasional dengan tujuan untuk dapat membantu pemerintah dalam menghadapi situasi yang terjadi di Nigeria. Tentunya dengan semakin banyak lembaga atau organisasi internasional yang menjalin hubungan kerjasama dengan Nigeria untuk menghadapai tantangan ini, Pemerintah Nigeria akan sangat terbantu untuk mewujudkan usahanya dalam mengakomodasi hak-hak asasi manusia dan tentunya mewujudkan Nigeria yang sejahtera serta mampu keluar dari permasalahan krisis ekonomi tersebut.

Pemerintah Nigeria dan lembaga yang berkaitan, telah menyetujui beberapa kebijakan yang tujuannya adalah untuk memulikan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di sektor lainnya. Selain Pemerintah Nigeria mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan kerjasama internasional dengan tujuan untuk dapat membantu Pemerintah Nigeria dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut. Bantuan ini mencakup bantuan keuangan, bantuan kemanusiaan, hingga bantuan pangan. Bentuk bantuan inilah yang saat ini diterima dan dibutuhkan oleh Nigeria sehingga Pemerintah Nigeria dapat menangani krisis ekonomi ini dengan optimal.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintahan Nigeria sebagai *decision makers*, telah merumuskan berbagai pelaksanaan terhadap urgensinya menghadapi krisis ekonomi di tahun 2023 yang tujuannya adalah untuk mengakomodasi hak dan kepentingan masyarakat di Nigeria, termasuk kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar yang merupakan proses pengambilan keputusan untuk menghadapi krisis ekonomi tahun 2023. Pada penlitian ini juga telah diuraikan beberapa faktor yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan, tujuannya adalah untuk menangani krisis ekonomi ini dengan optimal dan tepat sasaran.

Pada tahun 2023, Nigeria secara resmi mencatat dalam Sejarah terbesar mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk adanya anggaran subsidi bahan bakar yang telah banyak dihabiskan oleh Pemerintah Nigeria untuk mengakomodasi hak masyarakat Nigeria. Subsidi bahan bakar ini tujuannya adalah untuk membantu kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Nigeria agar dapat dijangkau. Sehingga harapannya dengan subsidi bahan bakar dapat menjaga kegiatan industri di dalam negeri, mampu bersaing dengan produk impor lainnya dan menjaga kondisi sosial yang dapat terkendali. Namun pada akhirnya, Pemerintah Nigeria secara resmi mengumumkan kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi di Nigeria.

Sebelum mengetahui bagaimana proses penyusunan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar Pemerintah Nigeria dapat menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi tahun 2023. Pada bagian Bab 2 penulis menjelaskan terlebih dahulu

mengenai lingkup permasalahan krisis ekonomi di Nigeria yang mencakup beberapa bagian, yaitu tantangan serta hambatan dari kebijakan subsidi bahan bakar dan dampak dari kebijakan penghentian subsidi bahan bakar bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi tahun 2023. Nigeria merupakan negara yang kaya akan sumber daya minyak dan gas, sehingga negara ini dapat menghasilkan pendapatan hingga miliaran dolar selama puluhan tahun terakhir. Dibalik Nigeria yang mampu menghasilkan pendapatan hingga miliaran dolar, ternyata masih terdapat isu yang selalu dikaitkan dengan pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatannya seperti adanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penyelundupan minyak dan gas, serta pabrik produksi dalam negeri yang hampir runtuh. Pada tahun 2023, Pemerintah Nigeria mengambil kebijakan untuk menghapus semua kebijakan subsidi bahan bakar di Nigeria, langkah ini tujuannya untuk mengurangi beban pendapatan negara dan memulihkan ekonomi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Dampak dari kebijakan ini tentu ditemukan pada masyarakat seperti kebijakan ini menyebabkan pengaruh terhadap harga konsumen, penurunan daya beli masyarakat, kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok, dan inflasi. Namun berbeda halnya dengan Pemerintah, dengan adanya kebijakan ini pemerintah mampu untuk meningkatkan pendapatan negara, penghematan anggaran, mendanai defisit anggaran, mengatasi inflasi, hingga mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sehingga pada bagian Bab 3, penulis menguraikan proses penyusunan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar Pemerintah Nigeria dapat menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi tahun 2023. Dengan menggunakan teori *decision making* yang dibuat oleh Richard C. Snyder, perumusan suatu

kebijakan oleh pembuat kebijakan (*decision makers*) perlu memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan teori *decision making*, seperti faktor internal, faktor struktur sosial masyarakat, faktor proses pengambilan kebijakan, faktor tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*decision makers*), dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini merupakan sebuah proses yang ada dan saling terhubung dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembuat kebijakan atau aktor hubungan internasional lainnya. Kebijakan yang optimal adalah kebijakan yang mampu menyejahterakan seluruh masyarakat di suatu negara. Pemerintah sebagai aktor dalam proses pembuatan kebijakan tentunya sangat diharapkan oleh masyarakatnya untuk bisa mewujudkan hak yang dimiliki warga negara, sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat lebih terjamin dan sejahtera. Dari hasil penelitian ini, berbagai kebijakan telah diupayakan oleh Pemerintah Nigeria termasuk kebijakan penghentian subsidi bahan bakar yang diharapkan mampu menyelesaikan krisis ekonomi ini, dan dampak jangka panjangnya yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Nigeria tanpa terkecuali.

4.2 Rekomendasi

Riset yang telah dilakukan oleh penulis secara spesifik membahas kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar oleh Pemerintah Nigeria dalam menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi tahun 2023 dengan menggunakan teori *decision making.* Pada penelitian ini penulis juga membahas tentang tantangan dari kebijakan subsidi bahan bakar dan dampak dari adanya kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar di Nigeria. Riset ini dirasa masih memiliki keterbatasan dalam menyentuh faktor-faktor lainnya yang menyebabkan krisis ekonomi tahun 2023 terjadi di Nigeria. Sehingga dengan adanya riset ini harapannya dapat mendorong adanya sudut pandang yang baru dan lebih luas untuk diperoleh dengan menggunakan teori lain ataupun sudut pandang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Adagunodo, M. (2022). The Effect of Oil Receipts and Fuel Subsidy Payment on The Current Account Deficit in Nigeria and Venezuela. *Annals of Spiru Haret University. Economic Series*, 137-152.

Adebayo, T. (2023, Juni 20). *AP NEWS*. Retrieved November 13, 2024, from https://apnews.com/article/nigeria-fuel-subsidy-solar-climate-9b3f32283b0f2fab9f6096761ef815e7

Adeniran, P. A. (2024). *Nigerian Gross Domestic Product Report Q4 2023.* Nigeria: National Bureau of Statistics.

Akinola, & A. O. (2018). Oil Subsidy Administration in Nigeria. *Globalization, Democracy and Oil Sector Reform in Nigeria*, 231-256.

Akinyemi, Opeyemi, Philip Alege, Ajayi, O., & Okodua, H. (2017). Energy Pricing Policy and Environmental Quality in Nigeria: A Dynamic Computable General Equilibrium Approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 268-276.

Asare, J., Mar Reguant, M, S., & C, S. (2020). Low oil prices during COVID-19 and the case for removing fuel subsidies. *Internation Growth Centre*, 1-15.

Bazilian, Morgan, & Onyeji, I. (2012). Fossil Fuel Subsidy Removal and Inadequate Public Power Supply: Implications for Businesses. *Energy Policy*, 1-5.

Beaton, C., Clarke, K., Adeoti, J., Chete, L., & Clarke Kieran. (2016). Compensation Mechanisms for Fuel Subsidy Removal in Nigeria. *International Institute for Sustainable Development Journal*, 38-49.

Chairawaty, F. (2009). Konflik Ekologi Politik Antara Negara Versus Masyarakat di Nigeria Studi Kasus : Ogoni Negara Bagian Rivers State. *Universitas Indonesia Library*, 40-75.

Chinery, N., & Ikoli, T. G. (2022, Maret 9). *Natural Resource Governance Institute*. Retrieved Juni 25, 2024, from https://resourcegovernance.org/articles/ending-nigerias-oil-dependency-not-if-whenand-how#:~:text=How%20dependent%20is%20Nigeria%20on,the%20well%2Dbeing%20of%20Nigerians.

Damania, Richard, Balseca, E., & De Fontaubert, C. (2023). *Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies.* Washington: World Bank Publications.

Elinwa, U. K., Ogbeba, J. E., & Agboola, O. (2021). Cleaner Energy in Nigeria Residental Housing. *Results in Engineering*, 100-103.

Erezi, D. (2024, Februari 26). *The Guardian Nigeria*. Retrieved Juli 7, 2024, from https://guardian.ng/nigeria-to-pay-unemployed-young-people-monthly-stipends/

Evans, Olaniyi, Nwaogwugwu, I., Vincent, O., Wale-Awe, O., Mesagan, E., & Ojapinwa, T. (2023). The Socio-economics of The 2023 Fuel Subsidy Removal in Nigeria. *BizEcons*, 12-32.

Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning. (2021). National Development Plan 2021-2025. *National Planning of Nigeria*, 33-70.

Genova, A., & Falola, T. (2003). Oil in Nigeria: A Bibliographical Reconnaissance. *History in Africa*, 137-144.

Harun, Mukaramah, Che Mat, S. H., Fadzim, W. R., Mohd Khan, S. J., & Zamzuri Noor, M. S. (2018). The Effects of Fuel Subsidy Removal on Input Costs of Production: Leontief Input-Output Price Model. *International Journal of Supply Chain Management*, 529-534.

Hasan, J. M. (2018). Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Renaissance*, 300-309.

Hasibuan, S. (2022). Paradigma Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.

Houeland, & Camilla. (2020). Contentious and Institutional Politics in a Petro-safe: Nigeria's 2012 Fuel Subsidy Protests. *The Extractive Industries and Society*, 1230-1237.

Ibanga. (2005). The Economics of Privatizing and Deregulating the Nigerian Downstream Oil Sector. *Valore International*, 1.

Ibrahim, A. (2023, Agustus 28). *Business Day Nigeria*. Retrieved November 13, 2024, from https://businessday.ng/energy/article/oil-sector-gdp-contribution-hits-lowest-in-8-years/

International Institute for Sustainable Development. (2023, Juni 20). *International Institute for Sustainable Development*. Retrieved November 14, 2024, from https://www.iisd.org/articles/deep-dive/nigeria-fuel-subsidy-reform

International Monetary Fund. African Dept. (2022). The Impact of Fuel Subsidy Reemergence in Nigeria. *Nigeria: Selected Issues Paper*, 4-14.

Izuaka, M. (2024, Februari 27). *Premium Times Nigeria*. Retrieved Juni 29, 2024, from https://www.premiumtimesng.com/business/business-news/672373-petrol-subsidy-removal-challenging-but-necessary-tinubu.html?tztc=1

Kohlmann, T., & Schwikowski, M. (2023, Juli 06). *Nigeria: Will ending fuel subsidies boost the economy?* Retrieved from Deutsche Welle: https://www.dw.com/en/nigeria-will-ending-fuel-subsidies-boost-the-economy/a-64668321

Mabogunje, & Akin L. (2010). Land Reform in Nigeria: Progress, Problem, and Prospects. *Annual Conference on Land Policy and Administration World Bank*, 2-25.

Maesaroh. (2022, September 07). *CNBC Indonesia*. Retrieved November 14, 2024, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20220907132535-4-370067/blt-ala-jokowi-dan-sby-mana-yang-paling-efektif

McCulloch, N., Moerenhout, T., & Yang, J. (2021). Fuel Subsidy Reform and The Social Contract in Nigeria: A Micro-economic analysis. *Energy Policy*, 112334.

Moyo, N., & Songwe, V. (2012, Januari 10). *Brookings Edu*. Retrieved November 12, 2024, from https://www.brookings.edu/articles/removal-of-fuel-subsidies-in-nigeria-an-economic-necessity-and-a-political-dilemma/

National Bureau of Statistics of Nigerian. (2020, May 23). National Bureau of Statistics of Nigerian. *2019 Poverty and Inequality in Nigeria: Executive Summary*, 5-23.

Nigeria Labour Congress. (2023, Mei 30). *Nigeria Labour Congress*. Retrieved November 14, 2024, from https://www.nlcng.org/fuel-subsidy-removal-do-not-dare-the-people-nlc/

Obasi, V. U., Ezenkwa, E. C., Onwa, D. O., & Nwogbaga, D. M. (2017). The Political Economy Of Fuel Subsidy Removal In Nigeria. *African Journal of Politics and Administrative Studies, Vol. 10, 1*, 51-70.

Ogunode, Jacob, N., Ahmed, I., & Ayoko, V. (2023). Application of Petrol Subsidy Funds to Address The Problems of Universal Basic Education for Sustainable Development in Nigeria. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1-9.

Oliveira, A. d., & Laan, T. (2010). *Lessons Learned from Brazil's Experience with Fossil-Fuel Subsidies and their Reform.* Geneva: Geneva: International Institute for Sustainable Development.

Olujobi, & Joshua, O. (2021). Deregulation of The Downstream Petroleum Industry: An Overview of The Legal Quandaries and Proposal for Improvement in Nigeria. *Heliyon 7*, 1-10.

Omitogun, Olawunmi, Emmanuel, A. L., Muhammad, S., & Adekomi, I. J. (2021). Environmental Impact of Economic Growth and Fuel Subsidy in Nigeria. *Economic Insights-Trends and Challenges*, 21-30.

Onyeizugbe, C. U., & Onwuka, E. M. (2012). Fuel Subsidy Removal as an Imperative for Enhancing Business Development in Nigeria. *VSRD International Jurnal of Business and Management Research*, 454-461.

Onyishi, A. O., Eme, O. I., & Emeh, I. E. (2012). The Domestic and International Implications of Fuel Subsidy Removal Crisis in Nigeria. *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter 1)*, 57-80.

Ounah, F. (2023, April 5). *Reuters*. Retrieved November 13, 2024, from https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-gets-world-bank-funding-social-program-ahead-fuel-subsidy-cut-2023-04-05/#:~:text=ABUJA%2C%20April%205%20(Reuters),Zainab%20Ahmed%20said%20on%20Wednesday.

Oyedeji, O. (2023, Januari 20). *Dataphyte*. Retrieved 7 11, 2024, from https://www.dataphyte.com/latest-reports/nigerias-expenditure-on-fuel-subsidy-in-17-years-adequate-to-build-three-450000bpd-refineries-neiti/

Oyedele, T., Akinduyite, A., Chime, E., & Olajubu, O. (2023). Fuel Subsidy in Nigeria - Issues, Challanges and The Way Forward. *Price Waterhouse Coopers*, 22-27.

Ozili, P. K., & Obiora, K. (2023). Implication of Fuel Subsidy Removal On The Nigerian Economy. In M. Hamdan, M. Anshari, N. Ahmed, & E. Ali, *Public Policy's Role in Achieving Sustainable Development Goals* (pp. 115-130). United States: IGI Global.

Ozili, Peterson K., & Obiora, K. (2023). Implications of fuel subsidy removal on the Nigerian economy. *Public Policy's Role in Achieving Sustainable Development Goals*, 115-130.

Pertiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 212.

Rentschler, J. (2018). *Fossil Fuel Subsidy Reforms : A Guide to Economic and Political Complexity.* United Kingdom: Routledge.

Snyder, R. C. (2002). *Foreign Policy Decision-Making.* New York: Palgrave Macmillan.
Snyder, R. C. (2002). *Foreign Policy Decision-Making.* New York: Palgrave Macmillan.
Snyder, R. C. (2002). *Foreign Policy Decision-Making.* New York: Palgrave Macmillan.
Steadman, S., Tindall, T., Tan, E., Okereke, C., Emenekwe, C., Onyeke, R., . . . Simpson, N. P. (2024). Towards Sustainable Fuel Subsidy Reform in Nigeria. *ODI Working Paper*, 3-50.
Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik.* Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers.
United Nations Nigeria. (2022, Juli 12). *United Nations*. Retrieved Juni 25, 2024, from https://nigeria.un.org/en/sdgs/9
Usigbe, L. (2023, Agustus 17). *Welcome to the United Nations*. Retrieved Juni 29, 2024, from https://www.un.org/africarenewal/magazine/august-2023/nigeria-ends-oil-subsidy-invest-savings-infrastructure-development
World Bank. (2023b). National Social Safety Net Program-Scale Up: Implementation Status and Results Report. *World Bank Documentation*, 1-10.
Yusuf, K. (2023, Juni 11). *Premium Times Nigeria*. Retrieved Juli 7, 2024, from https://www.premiumtimesng.com/news/603753-603753.html?tztc=1